

GRATIS

EDISI 15, JANUARI - APRIL 2018

COKELAT

The advancement of communication

Petani Kakao Berkelebihan
Mengukur Luas Kebunnya

OPINI

Pedoman dan Prinsip dalam
Memilih Pupuk yang Tepat
untuk Kakao

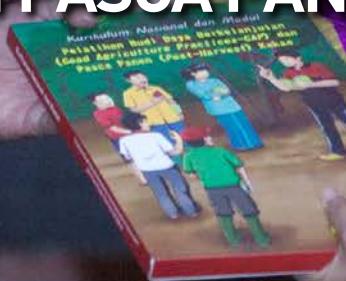
LAPORAN UTAMA

PELUNCURAN KURIKULUM NASIONAL
DAN MODUL PELATIHAN BUDI DAYA
BERKELANJUTAN DAN PASCA PANEN KAKAO

LAPORAN UTAMA



9 772540 772143



CATATAN editor

COKELAT

The advancement of communication

SALAH satu persoalan yang dihadapi oleh para petani kakao di Indonesia adalah adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki. Dan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, Cocoa Sustainability Partnership bersama dengan anggotanya, menghimpun koordinasi dan kerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian, Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia untuk menciptakan sebuah pedoman dan dokumen negara yang berupa Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao. Kurikulum dan modul pelatihan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan utama bagi para tenaga penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya untuk melakukan pendampingan langsung kepada petani di lapangan.

Persoalan lainnya yang dirasa menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas kakao adalah ketersediaan dan keterjangkauan pupuk spesifik untuk tanaman kakao. Dan mengingat hal tersebut, anggota-anggota Cocoa Sustainability Partnership yang tergabung dalam Gugus Tugas Agro Input and Planting Material meneluarkan sebuah rekomendasi Rasio Nutrisi Pupuk untuk Mengembalikan Unsur Hara. Rekomendasi ini kemudian nantinya bisa diaplikasikan oleh para penggerak pendampingan petani kakao sebagai pedoman dan prinsip dalam memilih pupuk yang tepat untuk kakao

Selamat membaca.

PENANGGUNG JAWAB

Wahyu Wibowo
Cocoa Sustainability Partnership

PEMIMPIN REDAKSI

Armin Hari

ALIH BAHASA

Hamsani Hambali

TATA LETAK

di5ketch Studio

KANTOR EKSEKUTIF:

Cocoa Sustainability Partnership (CSP)
Graha Pena Lt. 8, Suite 809
Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar
Tel: 0411 436 020
Fax: 0411 436 020
Email: communication@csp.or.id



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas



ICCRI



ASKINDO



Dewan Kakao Indonesia
Indonesian Cocoa Board



SULAWESI BARAT



SULAWESI SELATAN



INSTITUT PERTANIAN
BOGOR



FORUM KAKAO ACEH



FORUM KAKAO SULAWESI BARAT



FORUM KAKAO KOLAKA
FOKKA



FORUM MASYARAKAT KAKAO
LUWURAYA



FORUM KOMUNIKASI KAKAO SULAWESI TENGAH



IDH
the sustainable trade initiative



International
Finance
Corporation
World Bank Group



KALIMAJARI



rikolto



Sahabat Cipta



swisscontact



UTZ
Better farming
Better future



World Cocoa
Foundation



BARRY CALLEBAUT



Cargill



MARS
incorporated



Mondelēz
International



Nestlé
Cocoa Plan



Olam
Cocoa

Daftar Isi

OPINI

- 02** Petani Kakao Berkelebihan Mengukur Luas Kebunnya: Berdampak pada Estimasi Panen dan Volume Sertifikasi

LAPORAN UTAMA

- 10** Rasio Nutrisi Pupuk untuk Mengembalikan Unsur Hara: Pedoman dan Prinsip dalam Memilih Pupuk yang Tepat untuk Kakao

KANTOR EKSEKUTIF

- 14** Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP: Nafas Baru Kakao Berkelanjutan di Indonesia
- 22** Rapat Majelis Umum: Mencari Titik Baru
- 30** Kunjungan ke PUSLITKOKA, Jember, Jawa Timur
- 31** Perkenalan Direktur Eksekutif dan Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Cocoa Sustainability Partnership
- 34** Audiensi dengan Direktur Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian: Memberikan Akses kepada Petani terhadap Bahan Tanam Bersertifikat dan Berkualitas

FORUM KAKAO DAERAH

- 28** Mempersiapkan Kemandirian Forum Kakao Daerah di Masa Mendatang



- 16** Yayasan Kalimajari dan Kakao Lestari di Kab. Jembrana: Makna Komitmen dan Konsistensi dalam Berkarya



- 24** Peluncuran Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao



- 32** Audiensi Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian: Berupaya Bersama untuk Membangun Sektor Kakao Berkelanjutan Indonesia



BAHASA INDONESIA

02

OPINI
Petani Kakao
Berkelebihan Mengukur
Luas Kebunnya

10

LAPORAN UTAMA
Rasio Nutrisi Pupuk untuk
Mengembalikan Unsur
Hara

14

KANTOR EKSEKUTIF
Nafas Baru Kakao
Berkelanjutan di
Indonesia

16

PROFIL ANGGOTA
Yayasan Kalimajari dan
Kakao Lestari
di Kab. Jembrana

24

LAPORAN UTAMA
Peluncuran Kurikulum
Nasional dan Modul
Pelatihan Budi Daya
Berkelanjutan dan Pasca
Panen Kakao



28

FORUM KAKAO DAERAH
Mempersiapkan
Kemandirian Forum
Kakao Daerah di Masa
Mendatang

32

KANTOR EKSEKUTIF
Berupaya Bersama untuk
Membangun Sektor Kakao
Berkelanjutan Indonesia

34

KANTOR EKSEKUTIF
Memberikan Akses
kepada Petani
terhadap Bahan Tanam
Bersertifikat dan
Berkualitas

KURIKULUM NASIONAL DAN MODUL PELATIHAN BUDI DAYA BERKELANJUTAN DAN PASCA PANEN KAKAO

SALAH satu gugus tugas yang dibentuk oleh Cocoa Sustainability Partnership (CSP) adalah Gugus Tugas Kurikulum Nasional Kakao. Gugus tugas ini sendiri dimandatkan untuk menyusun sebuah dokumen nasional berupa Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao sehingga bisa tersedia untuk digunakan oleh publik, secara khusus dapat digunakan oleh penyuluh pertanian, baik penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Tujuan penyusunan kurikulum nasional dan modul pelatihan tersebut adalah untuk menyelaraskan manual yang sudah ada selama ini telah tersedia di anggota-anggota CSP dengan Peraturan Pemerintah sehingga bisa diupayakan untuk menjadikan dokumen nasional tersebut sebagai payung bagi manual-manual tersebut. Dan untuk mewujudkannya, CSP bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Prosesnya pun lumayan panjang dan dimulai selama tahun 2017, dan diluncurkan secara resmi pada Februari 2018. Sejalan dengan hal tersebut, proses penyusunan kurikulum nasional dan modul pelatihan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Sektor Kakao.

Di sisi lain, Gugus Tugas Agro Input and Planting Material pun telah menunjukkan kinerjanya sepanjang tahun 2017 silam. Dan salah satu titik penanda pencapaian anggota-anggota CSP yang tergabung dalam gugus tugas ini adalah dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi tentang Rasio Nutrisi Pupuk untuk Mengembalikan Unsur Hara. Harapannya adalah rekomendasi tersebut bisa digunakan oleh masyarakat luas dalam menjawab pertanyaan rekomendasi pupuk spesifik untuk tanaman kakao yang selama ini masih sangat jarang ditemukan di lapangan.

Dalam edisi kali ini, Redaksi COKELAT menyampaikan secara utuh tentang proses kedua kegiatan penting tersebut ke khala-yak pembaca. Dan ini adalah bukti dari koordinasi dan kolaborasi yang dibangun oleh anggota-anggota Cocoa Sustainability Partnership selama ini dengan para pihak, khususnya pemerintah pusat. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai tentu saja tentang upaya peningkatan kesejahteraan petani kakao rakyat melalui peningkatan produksi dan produktivitas kakao.

Majalah COKELAT Edisi perdana tahun 2018 ini juga menyajikan profil salah satu anggota baru yang tergabung dalam Cocoa Sustainability Partnership, yakni Yayasan Kalimajari yang berlokasi di Bali. Dengan beragam pencapaian dalam pengembangan kakao berkelanjutan, Yayasan Kalimajari telah menunjukkan tekadnya untuk bersama-sama memajukan kakao berkelanjutan di Indonesia, dan berupaya bersama dengan para pihak lainnya untuk memuliakan petani kakao melalui peningkatan kesejahteraan petani.

Hal penting lainnya yang ingin disampaikan oleh Redaksi COKELAT kepada pembacanya adalah perkenalan lebih lanjut dan mendalam dengan sosok baru yang memimpin Cocoa Sustainability Partnership sebagai Direktur Eksekutif. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, Wahyu Wibowo berupaya maksimal dengan para pemangku kepentingan di sektor kakao berkelanjutan Indonesia untuk memajukan petani hingga ke tingkat global.

Selain itu, Redaksi COKELAT juga menyajikan beberapa kegiatan penting lainnya. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Cocoa Sustainability Partnership berupaya bersama dengan anggota-anggotanya untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pengembangan Forum Kakao Daerah yang ada selama ini. Dalam kegiatan tersebut, CSP berupaya untuk mempersiapkan kemandirian Forum Kakao Daerah di masa mendatang.



Petani Kakao Berkelebihan Mengukur Luas Kebunnya: BERDAMPAK PADA ESTIMASI PANEN DAN VOLUME SERTIFIKASI

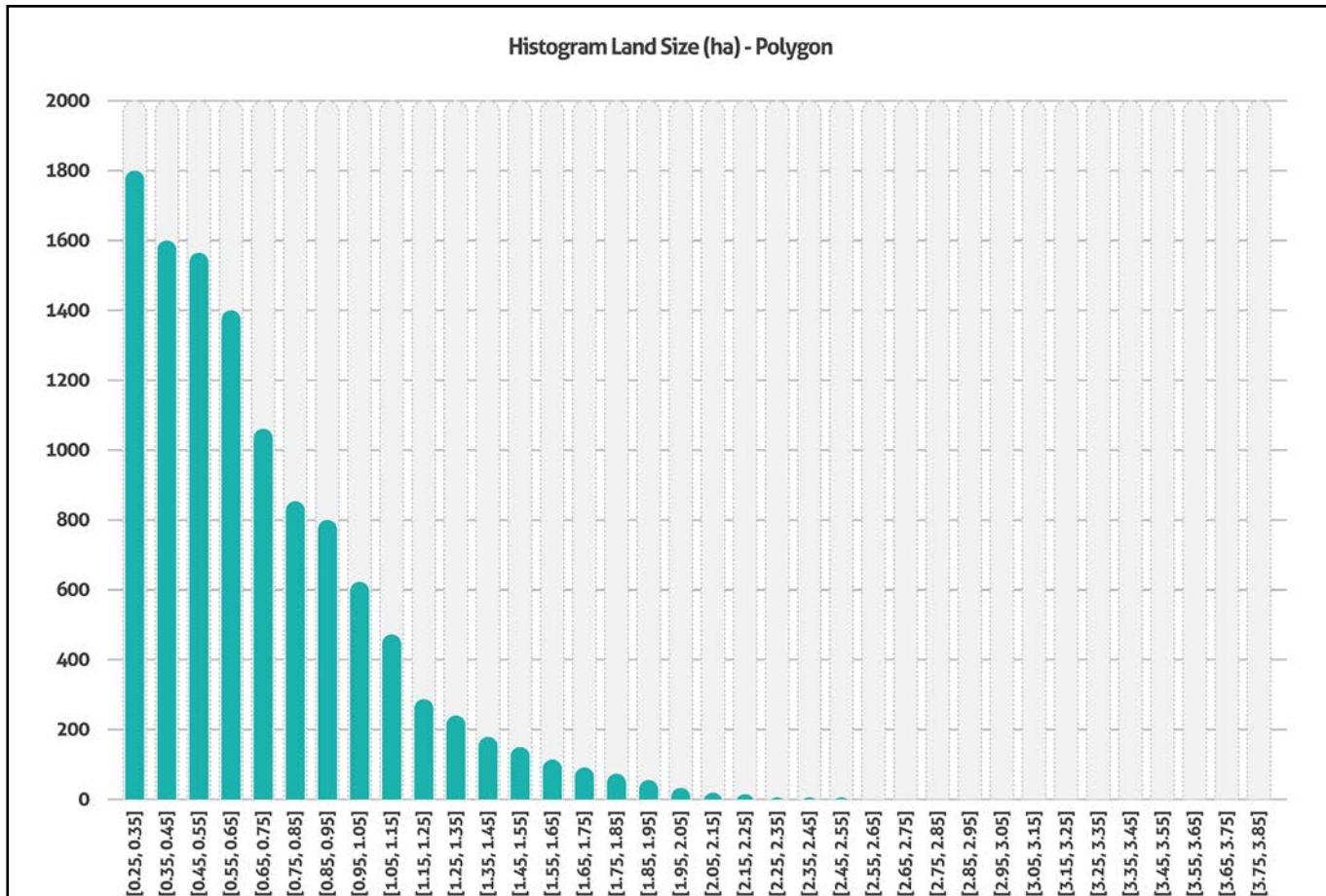
Dr. Dirk Lebe

*Team Leader Agribusiness Financing Facility
dan Deputy Program Director
Sustainable Cocoa Production Program*

Ringkasan

Data SCPP menunjukkan petani kakao di Indonesia berlebihan mengestimasi lahan mereka rata-rata 25% lebih luas. Kesalahan ini banyak terjadi khususnya pada luasan kebun satu hektar atau kurang, di mana tingkat kelebihan estimasinya mencapai 45.6% (0.83 ha dilaporkan oleh petani sendiri/swadaya dibandingkan dengan 0.57 ha luas lahan yang diukur melalui poligon). Sebaliknya, petani dengan kepemilikan lahan berukuran di atas satu hektar justru mengestimasi ukuran lahan 15.7% kurang dari luas sebenarnya (1.21 ha lahan yang diukur sendiri dibandingkan dengan 1.4 ha hasil pengukuran poligon).

Analisa ini menunjukkan bahwa petani yang melaporkan lahan seluas satu hektar atau kurang, kemungkinan telah dengan sangat keliru menaksir luasnya lahan mereka, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah panen per hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran kebun kakao di Indonesia se-sungguhnya lebih kecil dari apa yang diperkirakan sebelumnya, dan berimplikasi pada rerata panen per hektar dengan jumlahnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Para petani perlu mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai akurasi pengukuran lahan, misalnya dengan cara berjalan bersama-sama dengan mereka mengelilingi lahan dan memetakan batas-batasnya melalui poligon.



Estimasi panen berdasarkan besaran lahan yang dilakukan oleh petani bisa jadi sekitar 20-30% lebih tinggi, dengan asumsi bahwa petani melakukan pengukuran hasil panen dengan lebih tepat dibandingkan cara mereka mengukur luas lahannya. Estimasi ukuran lahan harus dikurangi hingga nanti data poligon terkumpul dan dikompilasi untuk memverifikasi estimasi panen oleh petani.

Versi Panjang

Program Produksi Kakao Berkelanjutan (SCPP) oleh Swisscontact telah melalui lebih dari 134.000 keluarga petani kakao melalui Praktik Budidaya Kakao/*Good Agricultural Practices* (*GAP*), Praktik Pengelolaan Gizi/*Good Nutritional Practices* (*GNP*), Praktik Pengelolaan Lingkungan/*Good Environmental Practices* (*GEP*), Praktik Pengelolaan Keuangan/*Good Financial Practices*

(*GFP*) serta topik-topik lainnya. Program ini telah mengumpulkan data yang sangat kaya dari setiap rumah tangga petani dan menggunakan informasi ini untuk menjelaskan beberapa hal yang belum diketahui sebelumnya. Artikel singkat ini mencoba untuk melihat lahan pertanian yang disurvei menggunakan perangkat GPS untuk memproduksi poligon yang menghasilkan representasi dimensi serta ukuran lahan pertanian yang lebih aktual. SCPP menggunakan sampel berupa 11.646 kebun kakao yang telah dipolygon tersebut di 6 provinsi di pulau Sulawesi dan Sumatera.

Data menunjukkan petani kakao di Indonesia berlebihan mengestimasi lahan mereka rata-rata 25% lebih luas (0.9 hasil diukur sendiri, sementara hasil pengukuran poligon seluas 0.72 ha). Kasus ini terutama muncul pada ukuran lahan kebun seluas satu hektar atau kurang, di mana persentase kelebihan

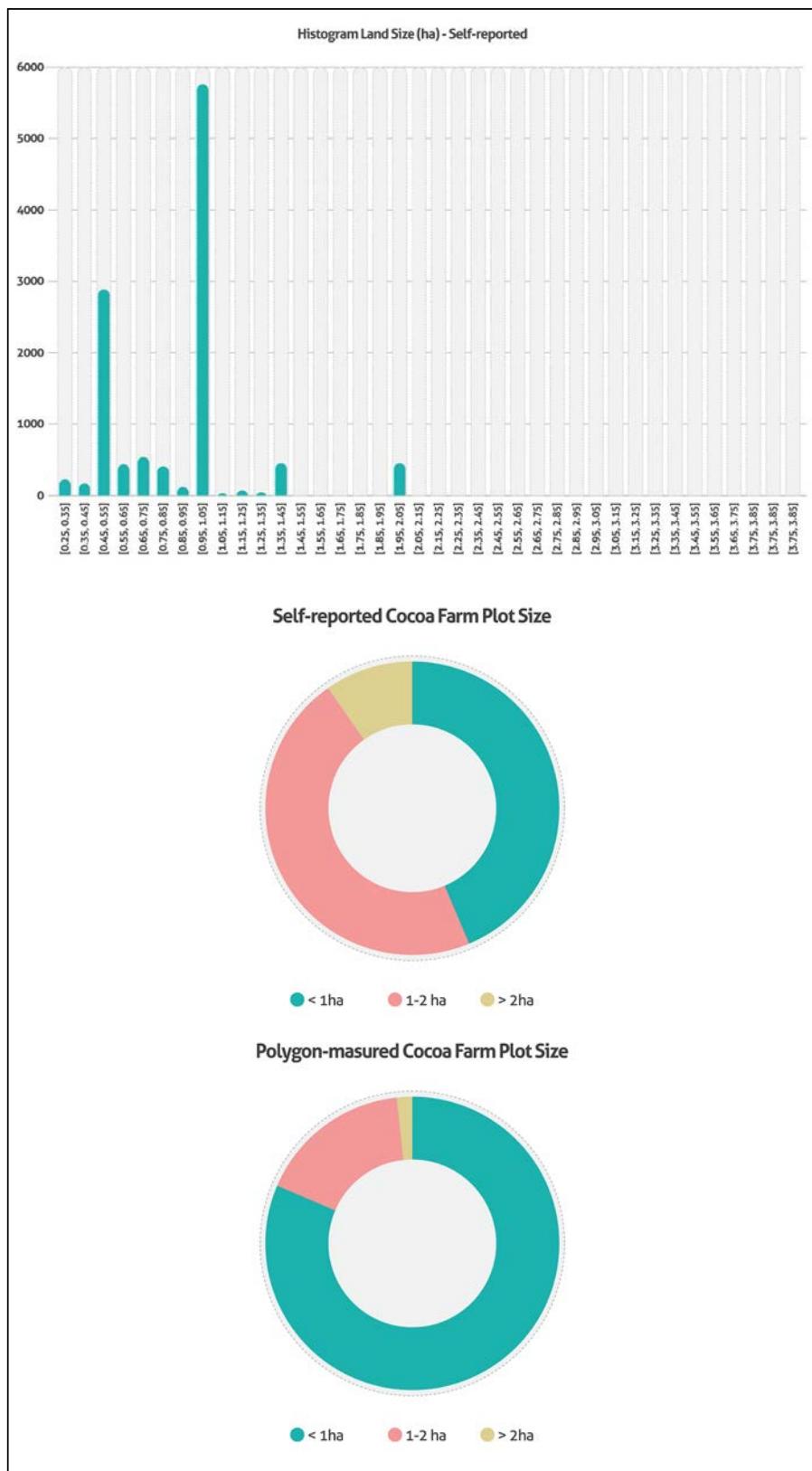
mengestimasi tersebut mencapai 45.6% (estimasi seluas 0.83 ha dibandingkan dengan 0.57 ha yang telah diukur secara akurat). Sebaliknya, terdapat 15.7% petani dengan luas kebun kakao di atas satu hektar justru mengestimasi luasan kebun mereka kurang dari ukuran sebenarnya.

Petani yang tidak memiliki sertifikat tanah untuk lahan pertaniannya, menunjukkan kelemahan yang sama dalam hal estimasi pengukuran lahan mereka, dibandingkan dengan petani yang memiliki sertifikat tanah. Namun demikian, bisa jadi hal ini disebabkan tidak seluruh lahan digunakan untuk menanam satu jenis komoditas saja, sehingga petani tetap harus mengestimasi bagian dari lahan mereka yang digunakan untuk perkebunan kakao. Letak kebun di kontur berlereng atau bentuk selain bujur sangkar akan membuat proses estimasi semakin kompleks.

Estimasi dilakukan sangat bias/menyimpang. 79.1% kasus tanah yang diukur sendiri atau secara swadaya, dibulatkan luasnya setara dengan 0.5, 1, 1.5, dan 2 hektar, sementara luas lahan dengan menggunakan poligon ukurannya lebih merata, sesuai harapan.

Mayoritas petani (57.2%) secara tepat mengestimasi lahan mereka sebesar satu hektar atau lebih. Namun demikian, ternyata hanya ada 18.9% petani yang luasan lahannya sungguh-sungguh satu hektar atau lebih setelah diukur poligon. Dari 18.9% petani yang memiliki lahan seluas satu hektar atau lebih, 1.7%nya memiliki lahan lebih dari dua hektar atau lebih.

Analisa menunjukkan bahwa petani yang melaporkan lahan seluas satu hektar atau kurang, kemungkinan telah dengan sangat keliru menaksir luas lahan mereka, dengan asumsi bahwa petani melakukan pengukuran hasil panen dengan lebih tepat dibandingkan cara mereka mengukur luas lahannya. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran kebun kakao di Indonesia sesungguhnya lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya, dan berimplikasi pada rerata panen per hektar dengan jumlahnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan, itulah mengapa rata-rata panen per hektar lebih besar dari yang pernah dilaporkan. Pendalaman lebih jauh perlu diberikan bagaimana cara mengukur lahan dengan lebih tepat, misalnya dengan berjalan berkeliling kebun dan memetakan batas-batas tanah petani ke dalam poligon. Pengumpulan data secara lebih akurat sangat dibutuhkan dan penting bagi para pemangku kepentingan di sektor kakao dan para pengambil kebijakan. Di artikel berikutnya, kita akan melihat contoh panen yang dilaporkan sendiri dibandingkan dengan transaksi riilnya. (SCPP/DL)





Rasio Nutrisi Pupuk untuk Mengembalikan Unsur Hara: PEDOMAN DAN PRINSIP DALAM MEMILIH PUPUK YANG TEPAT UNTUK KAKAO

Dibuat oleh Gugus Tugas Agro Input dan Bahan Tanam Cocoa Sustainability Partnership dan dibagikan pada Rapat Majelis Umum CSP, tanggal 09 Agustus 2017

Tujuan dan Dasar Pemikiran Dokumen Ini

Dokumen ini menjelaskan rasio semua nutrisi (unsur hara) yang harus ada dalam "Paket pupuk kakao untuk mengembalikan unsur hara secara lengkap dan pengelolaan pH tanah".

Mengapa Mengembalikan Unsur Hara

Setiap "mt" biji kakao kering beserta kulit buahnya mengambil 129 - 143 kg unsur hara dari kebun, dan satu-satunya nutrisi yang dapat dikembalikan ke sistem pertanian kakao adalah Nitrogen. Semua nutrisi lain termasuk nitrogen dalam jumlah besar harus dikembalikan ke kebun oleh petani baik dalam bentuk (dalam volume besar) bahan organik atau sebagai nutrisi terkonsentrasi seperti pupuk. Jika nutrisi tidak

diisi kembali, tanah akan kehabisan nutrisi (unsur hara), kebun akan mengalami penurunan hasil produksi dan kesehatan pohon akan menurun. Dibutuhkan dana dan upaya yang signifikan untuk mengembalikan tanah dengan kondisi seperti itu agar bisa subur lagi, tidak hanya untuk budidaya kakao tapi juga untuk tanaman lain. Aset tunggal terbesar bagi petani adalah tanahnya dan kesuburan tanahnya, kesuburan tanah merupakan salah satu pendorong utama produktivitas tinggi dan dengan demikian menghasilkan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, mengembalikan nutrisi perlu dilakukan baik untuk *Return on Investment (ROI)* jangka pendek maupun jangka panjang serta sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi terhadap aset lahan pertanian.

Mengapa Mengembalikan Unsur Hara Menggunakan Pupuk

Unsur hara dapat dikembalikan menggunakan bahan organik mentah atau olahan dan kotoran hewan, namun biasanya bahan organik mentah memiliki volume yang rendah dan rasio yang buruk begitu pula halnya pada kompos dan pupuk organik. Kotoran hewan biasanya mengandung nutrisi yang tinggi tapi jumlahnya tidak merata (beberapa nutrisi tinggi sedangkan yang lainnya rendah). Adalah mungkin tapi sulit untuk mengembalikan semua nutrisi yang dibutuhkan pohon kakao dalam rasio yang benar dalam bentuk bahan organik mentah atau olahan atau pupuk hewan serta harus diberikan dalam volume yang banyak sehingga membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang besar. Masalah terbatasnya ketersediaan beberapa bahan di beberapa area juga merupakan masalah yang dihadapi untuk pengembalian nutrisi lengkap melalui bahan organik dan kotoran hewan. Pupuk, di sisi lain, adalah mineral terkonsentrasi yang mudah ditangani dengan biaya tenaga kerja yang cukup rendah, serta mudah untuk memadukan rasio yang benar dan dapat dibeli kapanpun dibutuhkan. Beberapa bahan organik mutlak diperlukan untuk kesehatan tanah, namun pupuk berkualitas baik adalah cara yang paling efisien untuk mengembalikan unsur hara.

Tujuan dan untuk Siapa Dokumen Ini
Dokumen ini harus membantu petani, penyuluh, penyedia layanan kebun, Perusahaan penyedia layanan kepada petani dan industri pupuk untuk memilih pupuk yang sesuai yang memberikan ROI yang baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, yang secara implisit berarti bahwa kesuburan tanah jangka panjang adalah hal yang penting.

Dasar Pemikiran untuk Dokumen ini dan Informasinya

CSP menyadari bahwa pemahaman tentang kondisi tanah, kimia tanah, fisiologi tanaman dan optimalisasi praktik pertanian yang mengarah pada pilihan pupuk yang tepat adalah hal yang sangat kompleks dan berpotensi

membingungkan. Dokumen ini mencoba menyederhanakan pilihan tersebut dengan menggunakan beberapa prinsip dan pengetahuan serta pemahaman pupuk yang ada dalam bentuk sebuah tabel spesifikasi sederhana yang harus dipenuhi oleh pupuk kakao yang baik. Untuk alasan ini, kami memilih untuk tidak menggunakan indikator volume atau berat nutrisi dalam pupuk, melainkan rasio yang paling umum digunakan di industri pupuk, dan umum bagi petani dan yang lainnya.

Cara Menggunakan Dokumen Ini

Informasi utama dalam dokumen ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan rasio nutrisi dalam pupuk untuk pengembalian penuh dan penyerapan nutrisi tersebut oleh pohon kakao. Rasio tersebut digunakan dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkan pada kantong pupuk untuk menghindari kebingungan. Untuk setiap nutrisi, ada 'kisaran' dalam rasio dan semua nutrisi harus sesuai dengan rasionya masing-masing.

Misalnya, pupuk NPK sederhana pada komposisi 15-15-15 mengandung 15% N, 15% P dan 15% K dan 55% filler. Pupuk kakao lengkap dengan Amonia N (yang tidak diinginkan) dapat digambarkan sebagai NPK-MgO-CaO-SB-Zn dengan 12% N, 14% P, 15% K, 4% MgO, 5% CaO, 3% S, 0,7% B dan 0,6% Zn. Walaupun kandungan nutrisinya memenuhi semua spesifikasi, namun adanya N sebagai amonia (seperti yang selalu terjadi pada pupuk NPK) membuat pilihan ini kurang diminati. Pupuk semacam itu harus disertai dengan kapur atau dolomit dalam jumlah yang banyak untuk menghilangkan asidifikasi yang disebabkan oleh Amonia-N.

“Paket pupuk” yang lebih diminati adalah pupuk N yang diaplikasikan secara terpisah (yaitu Calcium Nitrate CaNO₃) yang menghasilkan N dan Ca, yang sering kali memiliki rasio 15% dan 20%. Nutrisi lainnya sekarang diaplikasikan dengan jumlah N yang sangat rendah atau nol yang diformulasi terpisah seperti NPK-MgO-CaO-SB-Zn dengan 0%

N, 18% P, 22% K, 5% MgO, CaO 10% 4% S, 0,7% B dan 0,6% Zn. Paket pupuk ini memenuhi semua spesifikasi sebagai pupuk yang baik dan tidak mengasamkan tanah.

Perhatikan bahwa formulasi yang paling efektif biasanya mengandung nutrisi tidak melebihi 60% dengan pengisi 40%, namun pengisi ini penting untuk produksi dan penggunaan pupuk.

Menentukan Pilihan Pupuk dan Volume Penggunaan

Cara Menentukan 'Spesifikasi Terbaik untuk Kebun'

'Formulasi terbaik' sebagian terkait dengan kekurangan atau tingkat nutrisi alami tinggi tanah yang diketahui. Jika diketahui bahwa tanah memiliki kadar P yang tinggi atau P yang relatif mudah larut, maka bisa dipilih formulasi dengan P yang lebih rendah. Dalam kebanyakan kasus, kadar tersebut tidak diketahui, walaupun semua kombinasi rasio dapat menghasilkan volume nutrisi yang dapat diterima, tetapi disarankan untuk memilih pupuk dengan rasio di *mid-range* (kisaran tengah). Perhatikan bahwa untuk sistem pertanian yang sangat produktif sebesar 1,5 mt/ha atau lebih, dianjurkan rasio K yang lebih tinggi pula.

Volume Penggunaan Pupuk

Dibutuhkan antara 129 - 143 kg nutrisi dalam pupuk untuk mengompensasi nutrisi yang diambil oleh 1 mt biji kakao kering dan kulit buahnya. Dengan asumsi 50% filler dan 20% kehilangan pupuk karena rembesan dan limpasan, kita perlu menerapkan 400 kg pupuk untuk menghasilkan 1 mt biji kering. Untuk mengimbangi hasil 2 mt/ha kita perlu menggunakan 700 kg pupuk (hampir dua kali lipat dosisnya).

Latar Belakang CSP dan Pekerjaan Pengembalian Unsur Hara

Sebagian besar kakao di Indonesia dihasilkan oleh petani kakao kecil di seluruh penjuru tanah air, di mana sebagian besar kakao tumbuh di Sulawesi dan Sumatra. Sebagian besar petani perlahan memperbaiki "Praktik-praktik Pertanian yang Baik" mereka ke tingkat yang lebih profesional dan banyak petani telah memulai atau mempertimbangkan untuk merenovasi lahan pertanian mereka dengan bahan tanam produksi tinggi, namun sayangnya hampir semua petani masih menggunakan pupuk Urea dan NPK yang dari waktu ke waktu mengasamkan tanah dan mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi, yang berdampak parah pada kapasitas produksi pohon kakao.

Agar bisa berhasil dalam budidaya kakao, petani tidak boleh hanya menggunakan bahan tanam produksi tinggi dan praktik pertanian profesional, namun juga harus mengelola tanah mereka secara profesional. Banyak tanah memerlukan perbaikan pH sampai tingkat 5,8 atau lebih tinggi melalui penggunaan kapur atau dolomite dalam jumlah besar, namun beberapa tanah kekurangan Bahan Organik dengan aktivitas mikrobiologi rendah sehingga memerlukan bahan organik, kompos atau pupuk organik. Selain itu, untuk memastikan tersedianya nutrisi di dalam tanah agar pohon kakao dapat tumbuh subur dan mendukung hasil panen yang tinggi, 'pupuk kakao' khusus harus digunakan untuk mengisi atau melengkapi semua nutrisi makro, sekunder dan mikro yang dikeluaran dari tanah pada setiap panen. Pupuk tersebut harus mengandung mineral N, P, K, Ca, S, Mg, Zn, dan B dalam rasio yang tepat (seimbang), sedangkan N tidak boleh digunakan sebagai amonia melainkan sebagai nitrat untuk menghindari pengasaman tanah.

Pupuk digunakan untuk banyak tanaman di Indonesia, dan terdapat subsidi pupuk untuk sejumlah tanaman pangan. Aplikasi pupuk bersubsidi terjadi dalam jumlah yang moderat pada tanaman kakao di mana pupuk tersebut adalah pupuk NPK dalam rasio seperti 15-15-15 atau 20-10-10 yang mengasamkan tanah dan tidak mengandung nutrisi sekunder atau mikro namun harganya murah, pupuk ini sangat populer di kalangan petani. PT. Pupuk Indonesia adalah perusahaan pupuk BUMN yang mendominasi pasar (dan memproduksi pupuk NPK bersubsidi) namun ada sejumlah perusahaan pupuk swasta berukuran kecil sampai sedang yang juga ingin menggali peluang untuk menjual 'pupuk khusus kakao'.

Kegiatan CSP

Bersama dengan ICCRI dan anggota lainnya, CSP telah mengembangkan sebuah tabel dengan rasio nutrisi untuk setiap nutrisi dalam pupuk pengembali nutrisi untuk kakao, ketimbang memberikan rekomendasi untuk formulasi pupuk. Jelas bukan peran CSP untuk menyetujui, mendukung atau merekomendasikan pupuk tapi yang lebih penting lagi, "formulasi tetap" semacam itu akan menghambat industri pupuk untuk melayani petani dengan pupuk baru, yang lebih baik dan

lebih terjangkau yang masih akan sesuai walaupun mungkin sedikit berbeda dari Rekomendasi CSP

Tabel 1. Rasio Pupuk Pengembali Nutrisi untuk Kakao.

Parameter	Satuan	Ambang Batas	
		Rendah	Tinggi
Nutrisi Makro			
No3- (dalam bentuk nitrat)	% dalam campuran	12	18
P2O5	% dalam campuran	12	20
K2O	% dalam campuran	15	25
Nutrisi Sekunder			
MgO	% dalam campuran	3	8
CaO	% dalam campuran	5	tinggi
S	% dalam campuran	3	10
Nutrisi Mikro			
B	% dalam campuran	0.6	1
Zn	% dalam campuran	0.4	0.9
Mn	% dalam campuran		
Mo	% dalam campuran		
Fe	% dalam campuran		
Cu	% dalam campuran		

Sumber data

Tabel Pengembali Nutrisi menentukan kisaran rasio nutrisi yang harus disertakan dalam 'pupuk kakao lengkap' atau 'paket pupuk'. Rasio didasarkan 'pengembalian nutrisi' yang diukur berdasarkan nutrisi yang diambil oleh biji dan kulit buah kakao dari sejumlah studi di sejumlah negara. Data pengembali nutrisi ini kemudian disesuaikan dengan aktivitas tanah setempat (misalnya limpasan atau kebocoran sejumlah nutrisi) dan interaksi kimia khas di dalam tanah. Data yang digunakan untuk tabel ini berasal dari Indonesia, Malaysia, Ghana, Kamerun, Nigeria dan Ekuador yang memastikan kompensasi pada berbagai kondisi tanah dan kebun dipertimbangkan.

Seiring waktu, wawasan baru akan berkembang yang akan memungkinkan CSP dan anggotanya untuk menyempurnakan atau mengubah beberapa rasio nutrisi.

Kesuburan Tanah, Pupuk, Pengembali (Pengisi Ulang) Nutrisi dan Rasio Nutrisi

Kondisi tanah dan ketersediaan hara di tanah bervariasi tergantung pada tanah, iklim, panen, tahun budidaya dan praktik pengelolaan tanah yang digunakan

- Beberapa tanah tidak cocok untuk produksi kakao sehingga lebih tepat ditanami tanaman lain.
- Beberapa tanah cocok untuk kakao tetapi memiliki tingkat bahan organik dan aktivitas mikrobiologisme yang rendah, atau tanah yang memiliki pH rendah, atau tanah yang habis nutrisinya atau memiliki ketidakseimbangan

nutrisi karena aktivitas budidaya yang berlangsung lama yang disertai dengan praktik pengelolaan tanah yang buruk, atau kombinasi dari masalah ini. Idealnya, tanah tersebut harus 'dikembalikan kondisinya' dengan menerapkan input yang paling dibutuhkan dalam mencapai tanah dengan pH yang baik, aktivitas mikrobiologi yang baik serta ketersediaan hara baik dalam keseimbangan yang tepat.

- Beberapa tanah sangat cocok untuk budidaya kakao tapi tentu saja, aktivitas mikroba tanah perlu 'dipelihara' dan nutrisi perlu 'diisi ulang' untuk memastikan kesuburan tanah di masa yang akan datang.
- Dan untuk mencapai tingkat produktivitas tanaman kakao yang maksimal, tanah dan nutrisinya juga harus 'dioptimalkan' untuk kakao.

Perhatikan bahwa pemulihan kesuburan tanah, perawatan kesuburan tanah, dan optimasi kesuburan tanah adalah tiga pendekatan untuk memastikan kesuburan tanah dalam mendukung produktivitas pohon kakao yang tinggi namun ketiganya memiliki prinsip-prinsip yang sama: (i) pilihan tanaman yang tepat sehubungan dengan struktur tanah, iklim dll., (ii) mengelola pH agar tetap di atas 5,8, (iii) memastikan kesehatan mikrobiologis dan aktivitasnya melalui bahan organik, dan (iv) memastikan tersedianya nutrisi yang tepat dalam keseimbangan yang tepat dengan penggunaan pupuk (pengisian ulang nutrisi).

Catatan: penting untuk diingat bahwa pengisian ulang/pengembalian nutrisi bukanlah solusi secara keseluruhan bagi masalah kesuburan tanah. Struktur tanah (*argyle, sandy, rocky*) dan posisi lahan pertanian (lereng, banjir reguler) merupakan faktor penting bagi keberhasilan budidaya kakao, bahan organik dan ekosistem mikrobiologi fungsional sangat penting bagi sistem akar pohon untuk menyerap nutrisi dari tanah. Oleh karena itu, karena sulit untuk mengubah struktur tanah atau lokasi kebun, CSP mendesak petani untuk mengevaluasi struktur tanah dan posisi kebun mereka agar sesuai dengan budidaya kakao, disarankan agar petani mendukung bahan organik dan kesehatan tanah dengan membiarkan semua bahan organik seperti sisa pemangkasan dan kulit buah kakao yang sehat tetap berada di kebun, sebaiknya di dalam 'parit dangkal' di antara pepohonan. Bila dibutuhkan, bahan organik tambahan bisa ditambahkan melalui bahan organik mentah, kompos atau pupuk organik.

Mengapa Fokus Awalnya pada Pupuk Kakao Pengembali Nutrisi

'Pupuk pengembali nutrisi kakao' dapat digunakan untuk mengembalikan ketersediaan unsur hara ke dalam keseimbangan nutrisi yang tepat, dan dapat menjaga ketersediaan unsur hara di tanah yang telah memiliki tingkat keseimbangan nutrisi yang baik, pupuk semacam itu dapat menjadi dasar 'paket pengoptimalisasi kesuburan tanah' untuk petani yang ingin mengoptimalkan tanah mereka untuk hasil yang tinggi. Oleh karena itu, 'Pupuk lengkap pengembali nutrisi' dengan



semua nutrisinya dalam rasio yang tepat merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengelola ketersediaan hara di tanah mereka dengan lebih baik dan mencapai hasil 2,5 mt/ha atau lebih, untuk target hasil yang lebih tinggi, nutrisi tambahan mungkin dibutuhkan.

Pengisian Ulang Nutrisi: Kebutuhan Pohon vs. Apa yang Kita Terapkan

Penting untuk dicatat bahwa pohon tidak menyerap semua nutrisi yang diaplikasikan pada tanah atau yang tersedia di dalam tanah. Bergantung pada struktur tanah, maka dapat terjadi kebocoran atau rembesan nutrisi ke tanah yang lebih dalam dimana akar pohon (kakao) tidak dapat menjangkau atau adanya rembesan karena hujan pada pupuk yang baru diaplikasikan. Selain itu ada reaksi kimia di dalam tanah yang mengikat beberapa nutrisi dan membuatnya kurang tersedia bagi sistem akar pohon, dan ada perbedaan kelarutan nutrisi serta kemudahan penyerapan nutrisi oleh sistem akar. Dengan demikian maka nutrisi dalam pupuk harus disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut di atas, dan oleh karena itu rasio nutrisi yang tepat dalam pupuk mungkin berbeda dari rasio nutrisi yang ditemukan pada biji kakao dan kulit buahnya.

Rasio nutrisi dalam tabel adalah rasio yang harus kita terapkan, bukan yang dibutuhkan pohon. Oleh karena itu rasio P mungkin tampak tinggi dibanding kandungan P dalam biji kakao dan kulit buah, namun P tidak terlalu larut dan tidak mudah diserap oleh sistem akar dan oleh karena itu volume P dalam pupuk harus ditingkatkan untuk memastikan jumlahnya cukup untuk bisa diserap oleh pohon. (csp)

SETELAH beberapa bulan Cocoa Sustainability Partnership (CSP) mengalami kekosongan posisi pemimpin organisasi, Dewan Pengawas CSP akhirnya memilih seseorang yang dianggap paling mampu untuk mengisi posisi sebagai Direktur Eksekutif CSP yang baru. Setelah melalui proses penyeleksian yang lamanpanjang, Wahyu Wibowo ditetapkan sebagai pemimpin baru.

Sebagai bahan perkenalan, Redaksi menghimpun hasil wawancara singkat dengan Wahyu Wibowo untuk memberikan gambaran yang luas tentang pandangannya terhadap perkembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia. Hasil wawancara ini juga ditujukan untuk mengetahui sosok Direktur Eksekutif CSP yang baru ini.

* * *

Bagaimana Anda melihat tantangan perkembangan dan kondisi sektor kakao berkelanjutan dewasa ini di Indonesia?

Melihat kondisi sektor kakao di Indonesia, tantangan tentu saja akan selalu ada. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa rata-rata umur tanaman kakao yang dirawat oleh petani di Indonesia tergolong tua sehingga produktivitas tidak maksimal. Petani kita tentu saja sangatlah paham bahwa salah satu jalan keluar dari persoalan ini adalah dengan melakukan rehabilitasi kebunnya, dengan peremajaan ulang atau penanaman ulang tanaman. Namun persoalannya adalah petani kakao di Indonesia, yang sebagian besar petani berskala kecil, mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber-sumber keuangan semisal lembaga perbankan untuk membiayai rehabilitasi kebun. Tidak hanya untuk persoalan akses pembiayaan, ketersediaan benih tanaman yang bersertifikat pun sangatlah terbatas dan tidak terjangkau dilihat dari kantong petani.

Tidak berhenti di situ. Hal lain yang menjadi perhatian selama ini adalah kondisi tanah yang juga mulai mengalami penurunan unsur hara, di mana salah satu upaya untuk mengembalikan sumber hara tersebut adalah dengan memberikan pasokan berupa pupuk.



Foto: Armin Hari

**Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP:
NAFAS BARU KAKAO BERKELANJUTAN
DI INDONESIA**

Namun kenyataannya adalah petani kakao kita menghadapi kondisi di mana pupuk tidak selamanya tersedia, dan kalaupun tersedia juga dengan harga yang tidak terjangkau. Akses terhadap pupuk bersubsidi juga sangatlah terbatas. Mengingat bahwa pupuk pemerintah tersebut hanyalah ditujukan utamanya bagi petani tanaman pangan, dan belum ada pupuk spesifik untuk kakao yang tersedia dan terjangkau bagi petani.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh para petani kita adalah perubahan iklim yang terjadi secara global. Penurunan daya dukung lingkungan dan anomali cuaca menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh petani di sentra-sentra produksi kakao di Indonesia.

Sebuah deskripsi di atas menyebabkan produksi kakao kita menurun, dan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani-petani kakao berskala kecil di Indonesia. Dampak lanjutannya adalah industri pengolahan nasional tidak bisa memaksimalkan kapasitas terpasang pengolahannya jika hanya bersumber dari produksi biji kakao kering secara nasional. Impor produk olahan kakao pun harus dilakukan.

Isu teranyar yang kita hadapi dewasa ini adalah selain umur tanaman kakao kita yang semakin menua, usia petani kakao juga bisa dikatakan tidak muda lagi. Dan di lain pihak, sektor kakao ini belum bisa menarik minat para generasi muda untuk ikut terjun ke dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas kakao.

Inilah beberapa tantangan yang sektor kakao kita hadapi saat ini. Namun kita harus tetap optimis dan melihat tantangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao di Indonesia.

Apa alasan Anda untuk bergabung dengan Cocoa Sustainability Partnership? Sebelum bergabung dengan Cocoa Sustainability Partnership, saya banyak bersentuhan dengan program-program keberlanjutan di Indonesia. Pengalaman saya lumayan panjang dengan program-program tersebut, baik pada saat saya bekerja di industri perkebunan, industri pengolahan multi nasional, serta lembaga-lembaga nasional dan internasional di Indonesia.

Sebelum bergabung, saya juga sudah membangun hubungan baik dengan beberapa anggota CSP dan para

pemangku kepentingan di sektor kakao berkelanjutan Indonesia, sehingga saya bisa melihat dan sangat meyakini komitmen dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas kakao secara berkelanjutan.

Berbekal pengalaman yang panjang, hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan di sektor kakao, dan komitmen yang kuat dari para anggota CSP dan pemangku kepentingan lainnya, saya kemudian memutuskan untuk bergabung dalam organisasi kemitraan publik-swasta ini.

Bagaimana pengalaman Anda sebelumnya membantu dalam pengembangan CSP di kemudian hari secara khusus, dan pengembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia secara umum?

Selama beberapa tahun, pengalaman saya telah menunjukkan bahwa nilai penting dari pengembangan sebuah organisasi yang menghimpun para pemangku kepentingan adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang setara dengan para mitra kerja dan pemerintah. Dan itu telah saya lakukan dengan baik.

CSP, ke depannya, haruslah diperkuat pada unsur fungsi yang bisa dilaksanakan oleh sekretariat. Oleh karenanya, organisasi ini haruslah diperkuat untuk menjalankan fungsi yang mampu menghimpun aspirasi dan memberikan informasi yang berguna bagi para anggotanya. Selain itu, CSP juga harus mampu menjalin kolaborasi atas nama seluruh anggota dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk sama-sama bekerja di pengembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia.

Bagaimana Anda mengembangkan CSP dan anggota-anggotanya?

Hal utama yang menjadi titik perhatian dalam pengembangan CSP beserta anggota-anggotanya adalah bagaimana kantor sekretariat bisa diisi oleh staf yang memiliki kompetensi untuk mendukung kegiatan harian CSP. Dan untuk mewujudkan staf yang berkompotensi tersebut, maka CSP sudah seharusnya juga mendukung pengembangan personal staf bersangkutan.

Sebagai organisasi keanggotaan, CSP harus dikembangkan dengan memegang teguh nilai kepercayaan yang ada. Nilai tersebut sangatlah penting bagi CSP untuk bisa bekerja secara optimal sesuai dengan amanat yang diembannya dan hal-hal yang telah didefinisikan secara jelas dalam Peta Jalan 2020.

Harapan dan ide Anda tentang bagaimana CSP seharusnya berperan?

Sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun para pemangku kepentingan di sektor kakao berkelanjutan di

Indonesia, CSP bisa berperan secara maksimal sebagai corong dari anggota-anggotanya untuk berhubungan langsung dengan pemerintah, organisasi donor, lembaga riset, universitas, industri berskala besar, industri kecil dan menengah, dan kelompok petani kakao. CSP bisa memainkan peran dalam mendukung kebijakan dan implementasi inisiatif-inisiatif pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia dengan melibatkan anggota dan para pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut ditempuh agar pengembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia bisa lebih terarah, tidak saling tumpang tindih, terintegrasi, dan terkoordinasi. Harapannya adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh CSP beserta anggota-anggotanya mampu menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan produktivitas kakao, peningkatan pendapatan petani, menarik minat generasi muda agar bisa terlibat dalam sektor ini, dan pola budi daya yang memperhatikan faktor lingkungan dan sosial.

Harapan dan ide Anda tentang pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia di masa depan?

Isu pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia adalah sebuah pekerjaan besar. Oleh karenanya, hal tersebut haruslah diupayakan secara massif dan bersama-sama oleh semua pihak yang bekerja untuk mewujudkan sektor kakao Indonesia yang berkelanjutan. Salah satu hal yang bisa dikoordinasikan bersama adalah pelaksanaan program-program pendampingan yang dilakukan oleh para anggota CSP dan pemangku kepentingan lainnya harus ditindaklanjuti agar kesinambungan perbaikan produksi kakao bisa diupayakan.

Jika periode sebuah program pendampingan yang dilakukan di lapangan sudah selesai, maka kecenderungannya adalah upaya peningkatan produksi juga biasanya akan berhenti juga. Padahal pencapaiannya sudah sangat bagus. Kita tentu saja tidak mau mengalami hal demikian tersebut. Kegiatan pendampingan yang telah memampukan para petani untuk memproduksi kakao sebesar satu ton per hektar, namun ketika program pendampingan yang dilakukan sudah berakhir, maka produksi petani akan turun hingga 600 atau 700 kilogram per hektar.

Para pemangku kepentingan haruslah saling berkoordinasi dan terbuka, fokus pada permasalahan utama, mendistribusikan tugas, dan memposisikan diri pada kondisi yang seimbang antar para pemangku kepentingan. Jika atmosfer tersebut bisa diciptakan, maka percepatan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia akan dicapai. Di masa mendatang, Peta Jalan Kakao 2015-2045 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, bisa disinerigikan dengan Peta Jalan 2020 dari CSP untuk saling berkoordinasi dalam pengembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia. (CSP/AH)



Yayasan Kalimajari dan Kakao Lestari di Kab. Jembrana: MAKNA KOMITMEN DAN KONSISTENSI DALAM BERKARYA

Agung Widiastuti
Direktur Yayasan Kalimajari

Semangat dan Apresiasi Petani Kakao Jembrana

Tiada yang pernah menyangka sebelumnya. Kata-kata pun tidak bisa mewakili rasa syukur dan bangga para anggota *subak* yang terlibat dalam Program Kakao Lestari. Mimpi yang disertai dengan kerja keras selama enam tahun akhirnya bisa diwujudkan. Peristiwa di tanggal 30 Oktober 2014 adalah tonggak penting bukti kebersamaan, semangat, dan kerja keras yang berujung pada proses pengiriman perdana Kakao Lestari ke Valrhona, Perancis. Tidak tanggung-tanggung, ekspor perdana tersebut dilakukan langsung oleh Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), Kabupaten Jembrana, Bali. Dan hingga tahun 2017, telah dilakukan empat kali pengiriman ke Valrhona, dan setiap tahunnya kisaran rata-rata volume yang

diekspor adalah 12,5 ton. Dan biji kakao kering yang diekspor tersebut adalah biji kakao fermentasi!

Proses ini adalah puncak dari seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dari hulu hingga hilir di Kabupaten Jembrana, Bali, untuk komoditas kakao berkelanjutan. *“Kakao adalah hidup saya.”* Demikian ungkapan kalimat sederhana dari seorang petani, I Ketut Wiadnyana. Ia juga adalah Ketua Koperasi/Kelihan Subak Sekar Wangi, Desa Yeh Embang Kauh, Kabupaten Jembrana. Ungkapan tersebut adalah ekspresi apresiasi dan harapan ratusan petani kakao di kabupaten ini yang telah tanpa mengenal lelah sedikit pun menumbuhkan harapan bahwa komoditas ini akan tetap berkelanjutan di daerah mereka. *“Ini adalah sebuah harapan akan makna “lestari”*



dalam sektor kakao. Sederhananya, bagaimana komoditas ini senantiasa ada dan tetap bisa menjadi bagian dari aktivitas keseharian di Jembrana.”

Lanjut I Ketut Wiadnyana. Komoditas kakao di daerah ini adalah sebuah potensi warisan kepada generasi penerus yang tidak akan punah oleh waktu. Dan anggota *subak abian* (kelompok tani) yang tercatat hingga saat ini adalah sekitar 609 orang petani kakao dan tergabung dalam 38 *subak abian*.

Apresiasi dan harapan para petani kakao inilah juga yang kemudian memberikan inspirasi kepada Yayasan Kalimajari untuk melakukan proses pendampingan kepada petani kakao, *subak abian*, UPH, dan Koperasi Kerta Semaya Samaniya. Dengan segala upaya dan sumber daya, Yayasan Kalimajari menyusun proses pendampingan tersebut dalam kurun waktu yang tidak singkat

dan pencapaian demi pencapaian pun bisa diwujudkan dengan perjuangan dan kerja keras bersama dan atas dukungan para pihak.

Harapan tersebut tentu saja bukan hal yang berlebihan jika melihat potensi yang ada di kabupaten ini. Kakao dan Jembrana adalah dua hal yang saling terkait dengan kuat. Komoditas kakao inilah yang telah memberikan sokongan utama dalam penghidupan masyarakat Kabupaten Jembrana. Pemenuhan pangan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan hunian yang layak telah menjadi bukti kontribusi komoditas ini. Meskipun, jika ditilik secara nasional, Kabupaten Jembrana tidak termasuk dalam urutan 10 daerah penghasil kakao utama di Indonesia, namun dinamika dan perjalanan yang telah diupayakan untuk mencapai pengembangan komoditas kakao berke-

lanjutan patutlah dijadikan perhatian.

Kakao Kini: Tantangan dan Motivasi Kakao Berkelanjutan

Produksi kakao Indonesia sangat tergantung pada kondisi pasar ekspor global. Dan industri kakao kita pun harus beradaptasi dengan semua perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Bukan hanya itu, semenjak peningkatan kesadaran konsumen, juga telah mempengaruhi tuntutan pasar komoditas pertanian secara signifikan. Konsumen tidak hanya mengutamakan kualitas produk yang mereka beli, namun juga memberikan perhatian lebih kepada isu keberlanjutan produk tersebut untuk aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kondisi ini kemudian yang memberikan pengaruh terhadap keterlibatan

para produsen dalam setiap program pengembangan sektor kakao yang diarahkan pada kondisi yang berkelanjutan. Namun kenyataan memperlihatkan hal yang berbeda. Hanya sebagian kecil produk sektor kakao Indonesia yang telah bersertifikasi. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada harapan bagi Indonesia untuk menembus pasar komoditas kakao berkelanjutan.

Atas dasar inilah Program Kakao Berkelanjutan, atau Kakao Lestari, diungkapkan dalam kerangka sertifikasi. Upaya ini merupakan inisiatif untuk melengkapi dan menyempurnakan program-program pengembangan kakao berkelanjutan yang telah diterapkan selama ini. Baik program yang diinisiasi oleh pemerintah, sektor swasta, atau pihak lainnya.

Semenjak tahun 2011, Yayasan Kalimajari bersama Koperasi Kerta Semaya Samaniya dan UTZ Certification mulai menerapkan proses pendampingan ke petani-petani kakao di Kabupaten Jembrana. Dukungan dari berbagai pihak juga berhasil dihimpun oleh Yayasan Kalimajari untuk menyokong program-program pengembangan kakao berkelanjutan tersebut. Misalnya dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Indonesia Eximbank, TUV NORD Jerman, OXFAM NOVIB, Bank Indonesia, Agriterra, LWR, Rabobank Foundation, dan lain sebagainya. Dengan dukungan tersebut, 582 orang petani yang tersebar di 35 *subak abian* di empat wilayah kecamatan mulai menerapkan semangat untuk membangun komoditas kakao melalui sistem penjaminan, atau proses sertifikasi. Aspek hulu hingga hilir menjadi konsentrasi utama program pendampingan yang dilaksanakan.

Selain penguatan di tingkat petani, pranata sosial *subak abian*, dan koperasi sebagai pemegang sertifikat juga mendapatkan proses penguatan kapasitas. Dengan harapan bahwa hal tersebut mampu menghadirkan nuansa pembelajaran, khususnya proses pemberdayaan yang semakin nyata dan kuat. Perjalanan program pengembangan ini sendiri akhirnya mampu mengantarkan posisi Koperasi Kerta Semaya Samaniya sebagai program pertama di Indonesia



Foto: Yayasan Kalimajari

yang menempatkan lembaga komunitas petani yang berbentuk koperasi sebagai pemegang sertifikat UTZ. Pencapaian tersebut tentu saja tidak bisa diraih sesederhana membalikkan telapak tangan. Proses jalan panjang yang harus dibangun dengan segala keterbatasan dan dinamika yang mengiringi. Keterbatasan sumber daya manusia, sumber pendanaan, membangun ICS sebagai sebuah sistem dan tim, dan peningkatan kapasitas di tingkat petani dan di tingkat koperasi merupakan sederetan tantangan yang dihadapi selama program pendampingan dilaksanakan.

Namun, semangat dan ambisi yang dimiliki oleh para petani menjadi suluh yang tetap menerangi pelaksanaan program. Upaya perubahan peningkatan kuantitas dan kualitas biji kakao, pemberdayaan kelompok/*subak abian*, pembangunan sistem penjualan bersama, dan harapan akan peningkatan pendapatan petani atas imbalan yang diterima dalam bentuk harga premium, menjadi motivasi bagi para petani dalam mengimplementasikan program kakao berkelanjutan di Kabupaten Jembrana, Bali. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah filosofi mendasar dari makna lestari, atau berkelanjutan, dalam kerangka sertifikasi. Pemaknaan tersebut menjadi media gerakan penyadaran akan nilai penting bagi komoditas

ini untuk tetap tumbuh dan berkembang secara lestari di Kabupaten Jembrana.

Manfaat yang Diperoleh dan Semangat Perubahan

Selama kurun waktu proses pendampingan yang dilaksanakan di masyarakat petani kakao, dinamika pun turut menyertai. Tantangan yang paling besar dirasa di awal pelaksanaan program adalah bagaimana mengubah pola pikir petani untuk melakukan perubahan secara bertahap dan bergerak maju. Seiring perjalanan kurun waktu itu juga, proses pendampingan dan komunikasi yang intensif antara petani dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, lembaga donor, dan lain sebagainya, dampak positif mulai dirasakan oleh para petani. Hal penting lainnya adalah bahwa posisi koperasi yang tumbuh semakin kuat.

Proses pendampingan ini memberikan beberapa manfaat bagi petani. Perubahan yang paling signifikan dan bisa dilihat adalah peningkatan produktivitas kebun dalam hal kuantitas yang merupakan dampak langsung dari penerapan budi daya berkelanjutan (*Good Agricultural Practices/GAP*). Dari data perkembangan yang berhasil direkam, kenaikan produksi rata-rata per pohon



Foto: Yayasan Kalimajari

adalah berkisar antara 1,8 - 2 kilogram biji basah yang sebelumnya hanya mencapai 1 - 1,5 kilogram per pohon. Dan tidak hanya itu, semangat petani untuk memperbaiki proses pasca panen juga ditumbuhkan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Tidak hanya manfaat yang bisa diterima oleh petani, *subak abian* pun juga memperoleh penguatan kapasitas kelembagaan dalam aspek pemasaran. Dalam pelaksanaan program, telah dibangun dan disepakati bersama bahwa mekanisme pemasaran dilakukan secara langsung dari petani ke koperasi, dan proses pengolahan dilakukan di Unit Pengolahan Hasil (UPH) di masing-masing *subak abian*. Dengan sistem dan mekanisme seperti ini, maka rantai pasar yang dikembangkan akan menjadi lebih sederhana, sehingga petani, atau *subak abian*, mampu memperoleh harga yang lebih tinggi. Penjualan juga

dilakukan secara kolektif di bawah koordinasi *subak abian*. Manfaat yang dirasakan adalah posisi tawar petani terhadap harga yang berlaku menjadi semakin kuat.

Manfaat lainnya adalah bahwa proses control kualitas dilakukan secara berjenjang. Mulai dari petani, *subak abian*, UPH, dan koperasi. Untuk saat sekarang ini, UPH telah mampu memberikan keuntungan yang baik bagi para petani anggotanya. UPH ini sendiri dibangun dengan semangat swadaya yang tinggi, dan tidak berorientasi pada batasan proyek, tetapi bertumpu pada semangat keberlanjutan yang telah mampu direalisasikan dengan baik.

Koperasi Kerta Semaya Samaniya sebagai pemegang sertifikat juga memperoleh manfaat dari proses pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Kalimajari ini. Pemberian tata kelola koperasi dilakukan secara bertahap,

terencana dengan baik, dan telah diajur dalam agenda program yang disusun bersama anggota koperasi. Selain itu, pemenuhan standar yang diatur dalam *Code of Conduct (COC)* UTZ Certified dari tahun ke tahun telah menjadi salah satu acuan dalam peningkatan peran koperasi dalam kerangka program sertifikasi. UTZ Certifikasi kami tempatkan bukan hanya sebagai “Label” tetapi telah kami tempatkan sebagai sebuah gerakan perubahan (*movement*) dari tahun ke tahun, karena ini bukan saja soal pemenuhan *control point* tetapi lebih pada bagaimana perubahan tersebut dapat dikontrol, dicatat dan dirasakan manfaatnya oleh petani dan koperasi.

Posisi tawar koperasi terhadap harga dan pilihan pasar pun menjadi semakin kuat. Koperasi tidak bergantung lagi dengan hanya satu pasar. Proses seleksi pasar yang berkomitmen memberikan



Foto: Yayasan Kalimajari

penghargaan dalam bentuk *reward* kepada petani, masih terus diupayakan. Koperasi Kerta Semaya Samaniya juga saat ini telah mampu menjadi rujukan untuk tujuan studi komprehensif dari berbagai daerah di Indonesia, yang tentunya mampu memberikan semangat untuk memperbaiki sistem tata kelola secara berkelanjutan.

Prestasi terakhir yang berhasil dicapai oleh Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) adalah terpilih dalam 50 besar secara global dalam Cocoa Excellent 2017 hasil seleksi dari 166 sampel dari 44 negara. Sampel tersebut dikirimkan dengan mengatas namakan I Made Sugandi dan difasilitasi penuh oleh KSS dan ICCRI. Pencapaian tersebut telah menjadi sebuah semangat fermentasi yang harus diperkuat dari tahun ke tahun. Prestasi kinerja lainnya yang telah ditunjukkan adalah keberhasilan dalam menjalin kerja sama dengan beragam pembeli. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah konsep ke-mitraan yang baik dengan Valrhona, Perancis dan juga *buyer* baru dari Jepang. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, KSS telah membangun kerja sama pemasaran dan telah mengirimkan dua kontainer dengan volume per kontainer adalah 12,5 ton. Kerja sama tersebut juga telah memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan diupayakan agar mampu berjalan secara berkelanjutan.

Tantangan yang Dihadapi

Selama proses pendampingan berlangsung, tantangan yang paling besar dihadapi adalah bagaimana membangun komitmen dari semua pihak yang terlibat. Komitmen yang dibangun tersebut bukan hanya berasal dari petani, tetapi juga pemerintah, legislatif, sektor swasta, pembeli/pasar, dan pihak lainnya untuk bersama memberikan dukungan secara berkelanjutan. Komitmen petani bukan sebagai faktor keberhasilan tunggal, tetapi bagaimana semua pihak dapat berperan maksimal. Dan inilah yang terus diupayakan mengingat nilai penting pembangun komitmen tersebut. Apalagi mengingat bahwa memfasilitasi petani dalam jumlah besar, 609 orang petani, sangatlah memerlukan dukungan, komitmen dan koordinasi.

Untuk membangun dukungan para pihak, Kalimajari juga saat ini gencar melakukan proses membangun dialog sinergitas dan advokasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Demikian pula advokasi kepada pihak *buyer* terutama *niche market*. Sangat disadari bahwa krisis generasi penerus dalam komoditi kakao juga menjadi ancaman yang sangat jelas telah menghadang di depan mata. Dorongan dalam bentuk program pelibatan generasi muda menjadi bagian dari perjuangan saat ini. Memberikan pemahaman bisnis

yang baik, membangun pasar yang lebih berkelanjutan dan mendorong semangat perbaikan kebun sebagai pusat tabungan merupakan beberapa target yang kami bangun melalui pendekatan petani muda. Saat ini hampir 80% IMS di masing-masing *subak abian* adalah petani muda yang mau kembali dan peduli pada pertanian. Proses ini kami bangun bersama dalam semangat UTZ SP (*Strategic Partnership*) Program S-BAK (*Sustainable and Advocacy in Kakao*) di Jembrana, untuk dapat ditingkatkan ke dalam tataran lingkup nasional.

Tantangan lain yang dihadapi adalah dari sisi kelembagaan. Proses pemberdayaan *subak abian* yang dari fungsi awalnya hanya sebagai lembaga sosial keagamaan menjadi proses pemberdayaan ekonomi produktif adalah tantangan tersendiri. Upaya transformasi sosial harus kemudian dilakukan secara bertahap dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah terbangun dalam sistem keorganisasian *subak*. Namun dengan sistem komunikasi yang terbangun dan ikatan yang mengakar dalam kelembagaan *subak*, bisa dimanfaatkan menjadi media komunikasi yang efektif dalam menjalankan program ini. *Sistem Paruman* (rapat rutin) masing-masing *subak* telah berimprovisasi sebagai media dam wadah untuk mengkomunikasikan program sertifikasi kakao berkelanjutan secara efektif.

Membangun kepercayaan dan kebersamaan dengan Koperasi Kerta Semaya Samaniya juga merupakan tantangan tersendiri. semenjak berdirinya di tahun 2006, koperasi ini pernah mati suri pada tahun 2010. Dan saat itulah kemudian, Yayasan Kalimajari datang dengan semangat keberlanjutan. Secara perlahan dan terencana, komitmen untuk membangun kembali dan memberdayakan koperasi ini mulai kelihatan.

Tidak mudah tentu saja dan bukanlah pekerjaan ringan. Mengumpulkan dan menarik kembali kepercayaan petani terhadap sistem tata kelola yang transparan dan dibangun oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. “*Inilah tantangannya. Yayasan Kalimajari bersama dengan berbagai pihak mendorong tumbuhnya sebuah lembaga yang kuat. Dan dari hanya 11 subak abian di tahun 2011, kini telah berkembang menjadi 38 subak abian. Dan semuanya adalah anggota koperasi.*” Kata Agung Widiastuti, Direktur Yayasan Kalimajari.

Proses Menuju Perbaikan dan Pembelajaran yang Bermanfaat

Tidak henti-hentinya, proses perbaikan dan penyempurnaan tetap diupayakan secara bersama. Aspek dari hulu hingga hilir yang telah dibangun senantiasa menjadi bahan evaluasi perbaikan. Hasil-hasil pembelajaran yang telah dikumpulkan selama program, didistribusikan semaksimal mungkin ke para petani untuk menemukan semakin banyak para tokoh-tokoh perintis yang akan berfungsi sebagai agen perubahan kepada petani lainnya. Inovasi, improvisasi, dan kreativitas pendamping dalam menterjemahkan prinsip-prinsip dasar *Code Of Conduct* dari UTZ Certified, Organic USDA, dan EU ke dalam Bahasa yang lebih sederhana sehingga bisa diterima dan diimplementasikan oleh para petani. Salah satu cara

pendekatan tersebut dilakukan adalah merubah sebutan COC dengan sebutan *uger-uger* yang artinya aturan dalam Bahasa Bali. Cara inovatif yang lainnya adalah mengalih bahasakan dokumen pedoman tersebut ke dalam Bahasa Bali sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Harapan utamanya adalah bahwa semakin mudah untuk diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan.

Koperasi dengan segala citranya yang bernilai positif dan negatif di Indonesia, haruslah diberdayakan sebagai lembaga milik komunitas. Dalam konteks program sertifikasi kakao berkelanjutan, koperasi harus didukung, diperkuat, dan dikembangkan guna mampu memberikan manfaat terbaik kepada anggotanya atas segala perubahan, perbaikan, dan perjuangan yang telah dilakukan petani. Segala dinamika yang telah dibangun oleh petani kakao di Kabupaten Jembrana bersama Koperasi Kerta Semaya Samaniya dan Yayasan Kalimajari sebagai pendamping serta dukungan intensif dari pihak lainnya, telah menjadi bukti bahwa petani dapat membangun proses sertifikasi berkelanjutan dengan semangat perubahan, kemandirian, dan kebersamaan. Yayasan Kalimajari menyadari bahwa proses tersebut tidaklah mudah. Namun dalam kurun waktu enam tahun melakukan proses secara bersama-sama dengan para pihak, khususnya petani, maka bisa dibuktikan bahwa keberhasilan bisa dicapai dengan melakukan pendampingan secara intensif, dan perubahan akan ditunjukkan kearah yang lebih baik. Dan hal yang sangat penting untuk digaris bawahi dalam proses ini adalah selama enam tahun tersebut, telah mampu dibuktikan bahwa petani kakao berskala kecil memiliki kemampuan untuk menunjukkan keberhasilan yang gemilang.

Semua proses ini juga sebagai bentuk perjuangan, komitmen, dan konsistensi dari Yayasan Kalimajari sebagai lembaga lokal di Bali yang ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Pulau Dewata juga memiliki potensi lokal komoditas perkebunan yang patut dibanggakan. “*Sekali lagi ini bukan hanya soal jual dan beli dan juga bukan soal sekeping biji tetapi soal perjuangan untuk mengibarkan bendera merah putih dan garuda di dadaku. Tentang kualitas kakao yang mampu bersaing di kancah global melalui perjuangan nilai-nilai fermentasi. Semoga Yayasan Kalimajari mampu memegang mandat ini bersama dengan para pejuang kakao di Jembrana, dan di Indonesia secara umum.*” Tutup Agung Widiastuti. (YK/AW)



Rapat Majelis Umum: MENCARI TITIK BARU

PELAKSANAAN Rapat Majelis Umum (*General Assembly Meeting*) Cocoa Sustainability Partnership pada Desember 2017 sedikit berbeda. Posisi Direktur Eksekutif kala itu masih belum terisi, dan Ketua Majelis Umum (*General Assembly*) yang dijabat oleh Jeremy Hicks dari Bridgewater juga seharusnya sudah diganti pada akhir tahun 2017. Begitu pula dengan jabatan Ketua Dewan Pengawas, dan Bendahara Dewan Pengawas. Namun atas beberapa pertimbangan, para anggota CSP dan pemangku kepentingan lainnya di sektor kakao berkelanjutan memutuskan bahwa Ketua Dewan Pengawas, Bendahara Dewan Pengawas, dan Ketua General Assembly masih harus menjabat hingga Direktur Eksekutif CSP terpilih. Dan ini diupayakan hingga bulan Maret 2018.

Tidak hanya itu, perencanaan kegiatan Cocoa Sustainability Partnership untuk tahun 2018 pun juga harus menunggu hasil peninjauan peta jalan CSP 2020 yang sementara masih berlangsung hingga Maret 2018. Dan partisipasi para anggota dan pemangku kepentingan lainnya di sektor kakao berkelanjutan sangat diharapkan untuk pelaksanaan peninjauan peta jalan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia ini. Namun terlepas dari itu semua, ada beberapa kegiatan yang masih harus dilaksanakan hingga awal tahun 2018, yakni penyelesaian penyusunan Kuriku-

lum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Kakao, dan fasilitasi Forum Kakao Daerah.

Pada pelaksanaan General Assembly Meeting kali ini, dihadirkan nara sumber untuk berbagi pembelajaran, pengalaman dan pengetahuan. Mereka adalah tim peneliti dari Universitas Sidney, dan perwakilan dari Pupuk Kaltim dan Saprotan Utama. Terkait presentasi dari Pupuk Kaltim dan Saprotan, diharapkan dapat menjadi bahan bagi anggota CSP untuk memutuskan spesifikasi pupuk mana yang sesuai dan terjangkau (harga) untuk digunakan oleh petani kakao di lapangan. Selain itu, Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, akan menjelaskan perkembangan kolaborasi bersama CSP dan anggotanya dengan pemerintah pusat dalam penyusunan Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao. “*Tantangan CSP pada saat ini adalah perihal kekosongan posisi Direktur Eksekutif CSP yang kemudian berimplikasi pada penambahan masa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan General Assembly yang seharusnya berakhir pada Desember 2017. Namun harapannya bahwa untuk sementara, masa tugas dan*



tanggung jawab untuk sementara dapat dilanjutkan sambil menunggu Direktur Eksekutif yang baru.” Demikian Imam Suharto selaku Ketua Dewan Pengawas Cocoa Sustainability Partnership menjelaskan kepada semua anggota dan pemangku kepentingan yang sempat hadir.

Jeremy Hicks sebagai Ketua General Assembly CSP menjelaskan bahwa pertemuan kali ini mengambil tema tentang solusi yang bisa dimunculkan bersama sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan di sektor kakao berkelanjutan, khususnya petani kakao, dalam memperoleh akses terhadap pupuk dan bahan tanam kakao. “*Untuk memberikan gambaran atas pupuk spesifik kakao yang dikembangkan dari Rasio Nutrisi Pupuk untuk Mengembalikan Unsur Hara, maka akan ada dua presentasi berbeda dari Pupuk Kaltim dan Saprotan Utama. Dari pemaparan mereka nantinya, diharapkan para anggota CSP dan pemangku kepentingan lainnya bisa memperoleh solusi alternatif tentang penyediaan dan pemenuhan pupuk spesifik kakao ini.*” Ujar Jeremy Hicks.

Untuk pelaksanaan penyusunan Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao, Ir. Lia Ratna Ernalia W., selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan,

Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan, Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, menjelaskan tentang proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar ini yang didasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Sektor Kakao. “Ada tujuh poin yang harus diperhatikan dalam pelatihan kelembagaan, salah satunya pemantapan kelembagaan berbasis kompetensi, yang menjadi dasar pembuatan kurikulum dan bahan ajar sebagaimana yang telah dilakukan kerjasama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan CSP.” Demikian penjelasan Ir. Lia Ratna Ernalia W.. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tim penyusun kurikulum nasional kakao ini telah memenuhi keterwakilan dari berbagai unsur, termasuk juga di antaranya keterwakilan dari Balai Pusat Pelatihan Pertanian Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jawa Timur.

Senada dengan hal tersebut, Suharman Sumpala dari Swisscontact sebagai perwakilan dari Gugus Tugas Kurikulum Nasional Kakao menjelaskan bahwa mandat yang diberikan kepada gugus tugas ini adalah penyusunan kurikulum kakao nasional sebagai manual dan bahan pelatihan sehingga tersedia untuk digunakan oleh publik. Kurikulum nasional ini juga secara khusus dapat digunakan oleh penyuluh pertanian, baik penyuluh pemerintah, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada petani kakao di lapangan. “*Tugas pokok gugus tugas dan tim penyusun adalah menyelaraskan manual yang sudah ada dan digunakan oleh anggota CSP, baik dari pemerintah, peneliti, dan petani sehingga dokumen tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan manual pelatihan budi daya kakao yang sedang disusun ini.*” Tegas Suharman Sumpala. Dokumen nasional ini nantinya akan diluncurkan secara resmi di bulan Februari 2018.

Menyangkut peninjauan peta jalan CSP 2020, Ross Jaax dari Swisscontact menyampaikan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didasarkan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai bagaimana CSP beserta anggotanya dalam mencapai target peta jalan tersebut semenjak dirumuskan pada tahun 2013, dan bagaimana upaya dalam mewujudkan pencapaian realisasi target tersebut. Selain itu, peninjauan peta jalan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada relevansi peta jalan dan bagaimana upaya untuk melanjutkan implementasinya.

Dalam pelaksanaannya, peninjauan peta jalan tersebut membidangi empat fokus pertanyaan, yakni sejauh mana kemajuan peta jalan menuju target tahun 2020 dan sejauh mana peta jalan menjadi tetap relevan dalam sektor kakao yang selalu berkembang; bagaimana Kantor Sekretariat CSP melakukan peran dan fungsi yang telah ditentukan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan peta jalan; potensi perbaikan dan pendekatan alternatif untuk peta jalan dan bagaimana upaya CSP sebagai organisasi untuk meningkatkan implementasi pencapaian targetnya; dan mengukur perubahan sistemik yang dimiliki oleh CSP terhadap pengembangan sektor kakao di Indonesia. “*Melalui konsultan independen yang mengerjakan proses peninjauan tersebut, CSP sangat mengharapkan kesediaan dan kesiapan para anggota CSP dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan terhadap peta jalan yang sudah ada.*” Ross Jaax menjelaskan proses penerapan kegiatan peninjauan peta jalan CSP 2020.

Di sesi berikutnya, David Guest dari Universitas Sydney yang membawahi sebuah tim gabungan peneliti dari Universitas Sydney, Australia, dan Universitas Hasanuddin, Makassar, mempresentasikan isu penelitian tentang keberlanjutan dan profitabilitas sistem pertanian berbasis kakao di Indonesia. Dari pemaparannya, disajikan bahwa tujuan penelitian tersebut di antaranya adalah untuk mencoba memahami kendala menyangkut produksi, produktivitas petani, dan profitabilitas kakao; mengidentifikasi peluang untuk intensifikasi, diversifikasi, dan kewirausahaan kakao; dan untuk memahami bagaimana kesehatan petani mempengaruhi produktivitas. Disampaikan lebih lanjut bahwa keterbatasan-keterbatasan utama petani adalah rendahnya kapasitas finansial dan hal ini berdampak pada kemampuan untuk mengadopsi teknologi yang lebih baik. Di samping itu, usia petani kakao yang juga sudah tua menjadi faktor pentru lainnya. “*Menurut data yang ada, 53% petani di Indonesia memiliki kesehatan yang buruk.*” Ungkap David Guest. Salah satu strategi peningkatan produksi kakao dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan petani. Kondisi kesehatan yang harus diperhatikan bukan hanya pada petani, tetapi demikian halnya juga dengan kondisi kesehatan keluarga mereka. (CSP/AH)



Foto: Armin Hafi



PELUNCURAN KURIKULUM NASIONAL DAN MODUL PELATIHAN BUDI DAYA BERKELANJUTAN DAN PASCA PANEN KAKAO

SEBAGAI hasil pencapaian kinerja para anggota Cocoa Sustainability Partnership (CSP) dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao ini pun bisa dihadirkan ke masyarakat umum pada tahun ini. Dan nantinya, proses penyuluhan dan pendampingan ke petani kakao rakyat bisa dilakukan oleh masing-masing penyedia layanan penyuluhan. “*Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan ini adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh CSP beserta anggota anggotanya untuk memampukan para petani kakao agar bisa menggandakan produktivitas mereka dan meningkatkan kualitas dalam cara yang berkelanjutan. Ini dilakukan juga untuk menjadikan sektor kakao Indonesia kompetitif secara global, layak secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.*” Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP membuka acara peluncuran dokumen nasional ini. Ditambahkan juga bahwa CSP adalah sebuah organisasi yang merangkul semua pemangku kepentingan kakao dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi, meningkatkan kepercayaan,

komitmen, komunikasi, dan keterbukaan demi berhasilnya pemberdayaan petani kakao dan organisasinya.

Dalam pemaparan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSD-MP), Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Lia Ratna Ernalia W. menyampaikan bahwa tujuan penyusunan kurikulum nasional dan modul pelatihan budi daya berkelanjutan dan pasca panen kakao ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional dan berdaya saing, dan tersedianya sebuah dokumen yang bisa digunakan oleh publik khususnya para penyuluhan pertanian baik penyuluhan swasta maupun swadaya.

Proses penyusunannya yang dilaksanakan selama tahun 2017 ini adalah hasil kolaborasi dan kerja sama antara Cocoa Sustainability Partnership dengan dua institusi penting di Indonesia. Institusi tersebut adalah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSD-MP), Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, dan Pusat

PELUNCURAN KURIKULUM NASIONAL dan MANUAL BUDI DAYA BERKELANJUTAN (GAP) DAN PASCA PANEN (POST HARVEST) KAKAO

Oleh :
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENNGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
 Jakarta, 09 Februari 2018



Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan ini juga dijalankan bersamaan dengan proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk sektor kakao.

Dalam kesempatan yang sama pula, Ir. Lia Ratna Ernalia W., selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan, BPPSDMP, juga menyampaikan bahwa peluncuran kurikulum dan modul pelatihan ini dilakukan sebagai wujud sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di sektor kakao bahwa Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao sudah tersedia dan menjadi pedoman dalam

memberikan pelatihan dan pemberdayaan petani kakao di Indonesia. “*Penerapan kurikulum nasional dan modul pelatihan ini adalah sebagai pedoman untuk melatih para penyuluhan pertanian (penyuluhan pemerintah, penyuluhan swasta, dan penyuluhan swadaya) akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah dan pemangku kepentingan kakao yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.*” Demikian Ir. Lia Ratna Ernalia W. menyampaikan bagaimana dokumen tersebut akan digunakan.

Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc., yang hadir mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, menjelaskan bahwa tujuan utama dalam penyusunan kurikulum nasional dan

modul pelatihan ini adalah agar pelaksanaan pelatihan bagi petani kakao dapat dilaksanakan secara terstandar di manapun pelatihan tersebut dilaksanakan. Dan menyikapi hal tersebut, skema pemberdayaan sumber daya manusia yang terstruktur haruslah diupayakan dan dirancang agar dapat mencapai target produksi komoditas kakao. “*Dalam hal pemberdayaan, pemerintah dan sektor swasta sangatlah diharapkan untuk dapat membangun koordinasi dan sinergitas yang baik sehingga manfaat dari peningkatan sumber daya manusia pertanian tersebut bisa menjangkau cakupan yang lebih luas. Dan muara dari ini semua adalah bagaimana upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pening-*



katan produksi kakao." Ujar Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc..

Dukungan dari BPPSDMP dalam hal fasilitasi pelatihan teknis kakao, juga dapat dikerjasamakan dengan Balai Pelatihan, baik itu UPT Pelatihan Pusat, maupun UPT Pelatihan Provinsi. Jika tenaga asesor (penguji), Tempat Uji Kompetensi, dan perangkat Uji Kompetensi lainnya sudah tersedia, maka sertifikasi profesi baru bisa dilaksanakan. "Melalui penyuluhan dan pendampingan secara terpadu, maka diharapkan bahwa sinergitas keterampilan petani dalam budi daya kakao dan pengelolaannya bisa diwujudkan. Dan peningkatan produksi yang berkualitas pun dapat dicapai secara merata di berbagai sentra

produksi kakao, dan kompetitif di berbagai tingkatan pasar." Tutup Kepala Pusat Pelatihan Pertanian ini.

"Kita semua sebagai para pemangku kepentingan di sektor kakao tidak pernah berhenti untuk berjuang dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor ini. Salah satu sumber ekonomi kita dari sektor tanaman adalah kakao." Demikian Ir. Musdhalifah Machmud, MT. selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia, pada saat membuka secara resmi peluncuran Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao di Ruang Graha Sawala, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 09 Februari 2018 silam. Ditambahkan lagi bahwa untuk pemuatan dan pengamanan sektor pangan, tumpuan hanya pada sektor tanaman pangan saja. Namun untuk mengembangkan perekonomian, sektor tanaman perkebunanlah yang menjadi penyumbang terbesar selama ini.

Dikatakan pula bahwa tujuan utama dari penerbitan kurikulum nasional dan modul pelatihan untuk sektor kakao ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama membangun koordinasi dan sinergitas dalam meningkatkan penghidupan para petani kakao yang dominan adalah petani rakyat. Dan salah satu cara untuk upaya peningkatan kesejahteraan



Foto: Armin Hari

tersebut bisa ditempuh dengan peningkatan produksi tanaman kakao mereka. Sangat diharapkan bahwa kurikulum nasional dan modul pelatihan ini bisa memberikan semangat baru bagi para petani kakao di Indonesia dan mampu menjadikan petani kakao sebagai petani profesional dengan memenuhi dan menguasai pelaksanaan modul di dalam dokumen ini. "Selain itu, penyuluhan kepada petani juga harus ditumbuhkan kembali. Penyuluhan adalah salah satu unsur penting dalam pengembangan

ekonomi di wilayah-wilayah pertanian dan perkebunan. Petani sangatlah memerlukan contoh-contoh yang bisa dilihat dalam merawat tanaman mereka." Lanjut Ir. Musdhalifah Machmud, MT. yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat Cocoa Sustainability Partnership.

Ibu Musdhalifah juga dalam kesempatan ini mengajak para pemangku kepentingan di sektor kakao untuk ikut bergabung dengan Cocoa Sustainability Partnership. Dikatakan bahwa CSP ada-

lah salah satu wadah untuk berkumpul, menyumbangkan pikiran, bersama-sama merencanakan, dan melakukan sesuatu untuk membantu peningkatan sektor perkebunan, khususnya kakao, di Indonesia. (CSP/AH)



MEMPERSIAPKAN KEMANDIRIAN FORUM KAKAO DAERAH DI MASA MENDATANG

SALAH satu mandat yang dilaksanakan oleh Cocoa Sustainability Partnership (CSP) beserta anggotanya adalah memfasilitasi keberadaan Forum Kakao Daerah (FKD) yang tersebar di beberapa sentra produksi kakao di Indonesia. FKD inilah merupakan forum yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor kakao berkelanjutan. Dan untuk meningkatkan fungsi dan peranan forum sebagai jaringan yang paling ideal, adalah memastikan keterlibatan para petani di wilayah-wilayah sentra produksi kakao.

Dan dalam rangka mengembangkan fungsi dan peranan FKD tersebut di masa mendatang, CSP bersama Dewan

Kakao Indonesia (Dekaindo) melakukan pertemuan dengan para ketua dan pengurus forum. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memberikan gambaran tentang keberadaan forum dan membahas isu-isu kakao berkelanjutan di tingkatan regional yang selama ini dihadapi.

Salah satu isu yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mempersiapkan kemandirian forum di masa mendatang. Beberapa capaian penting pun dipaparkan bersama untuk memberikan deskripsi utuh tentang keberadaan forum kakao daerah. Misalnya saja Forum Kakao Aceh yang memperoleh dukungan pendanaan dari APBNP tahun 2017 untuk pengu-

atan kelembagaan dan pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Provinsi Aceh. Selain itu, beberapa organisasi donor internasional juga memberikan sokongan pendanaan ke forum ini, seperti GIZ SICCR, USAID Les-tari, IDH. Peranan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga mengalokasikan sumber daya mereka untuk pengembangan kakao berkelanjutan di Provinsi Aceh. Tidak hanya itu, Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI) dan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) juga mengupayakan dukungan ke Forum Kakao Aceh berupa kontribusi non materi untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang diinisiasi forum ini.



Pencapaian serupa juga ditunjukkan oleh Forum Kakao Sumatera Barat. Forum ini telah mampu memfasilitasi terbentuknya empat forum kakao daerah di tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dan kinerja para pemangku kepentingan yang tergabung dalam forum ini juga telah diakui oleh pemerintah provinsi. Salah satu dokumen penting pengembangan sektor perkebunan kakao di provinsi ini berhasil diupayakan secara bersama oleh Forum Kakao Sumatera Barat dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Provinsi Sumatera Barat. Hasil kolaborasi dan koordinasi tersebut adalah dokumen profil kopi dan kakao dan peta jalan kakao Sumatera Barat 2018-2022.

Di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Kakao Kolaka selama ini memfasilitasi delapan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan satu koperasi di tingkat kabupaten dengan aset mencapai Rp. 1 miliar. Selain itu, forum ini juga berhasil mengandeng pemerintah daerah untuk pelaksanaan program peremajaan tanaman kakao seluas 2.000 hektar yang lokasi anggarannya berasal dari APBNP dan APBD. Kegiatan peremajaan ini difokuskan di satu kecamatan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak hanya berhenti di situ, Forum Kakao Kolaka juga telah mengembangkan potensi sumber entres kakao di setiap desa di Kabupaten Kolaka.

Forum ini juga telah berhasil menjalin bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2017 untuk menerbitkan 950 sertifikat tanah kebun (persil) yang pada awalnya hanya ditargetkan sebanyak 500 sertifikat. Di tahun 2018, Forum Kakao Kolaka memperoleh komitmen dukungan pendanaan dari pemerintah daerah sejumlah Rp. 90 juta untuk penguatan kelembagaan. Dan juga keberhasilannya membangun kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memperoleh dukungan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

Begitu pula hanya dengan Forum Masyarakat Kakao Luwu Raya. Forum yang berpusat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ini memperoleh dukungan

dana dari pemerintah daerah sebesar Rp. 30 juta di tahun 2017, dan di tahun 2018 ini juga telah dialokasikan sejumlah Rp. 50 juta untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum.

Forum Komunikasi Kakao Sulawesi Tengah juga menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah meminta forum ini untuk menyusun sebuah proposal tentang pemanfaatan dan pengembangan beberapa aset yang dimiliki sehingga bisa difungsikan sebagai tempat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta sebagai destinasi pembelajaran bersama. Aset-aset tersebut berupa UPT Kakao seluas 100 hektar, Rumah Cokelat, UKM di sektor produksi cokelat yang sudah berkembang, dan beberapa aset lainnya. Muatan proposal tersebut mencantumkan tentang bagaimana forum daerah bisa berkontribusi nyata dalam upaya pengembangan kakao berkelanjutan di tingkat provinsi dengan cara menyelaraskan semua fungsi aset-aset tersebut, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh petani dan pemangku kepentingan lainnya di sektor kakao.

Dalam proses diskusi yang digelar, hal utama yang muncul adalah Forum Kakao Daerah seharusnya sudah bisa membangun dan mengembangkan strategi kemandirian mereka di masa mendatang. Misalnya saja dengan memiliki legalitas hukum sehingga mampu bekerja sama dengan organisasi donor, penguatan Desa Mandiri Benih sebagai unit usaha yang dimiliki forum, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan forum sebagai alternatif dan peluang untuk menjadi agen distribusi dari perusahaan-perusahaan pupuk dan penyedia bahan tanam. Forum Kakao Daerah juga diharapkan untuk sensitif pada persoalan pemberdayaan dan penguatan petani perempuan di daerah mereka, dan forum mampu memicu lahirnya pusat-pusat pembelajaran di sektor kakao dan cokelat di daerah masing-masing

Sebagai hasil dari pertemuan koordinasi ini, Forum Kakao Daerah yang berlokasi di sentra-sentra produksi kakao di Indonesia sangat diharapkan agar masing-masing forum mampu menginisiasi lahirnya kebun sumber benih di wilayah kerjanya untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan bahan tanam kakao berkualitas di daerah, dan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan perusahaan pupuk sebagai solusi penyediaan kebutuhan pupuk khusus kakao di daerah termasuk kerjasama wara laba dengan Puslitkoka dalam upaya peme- nuhan benih di lingkup daerah. (CSP/AH)

SEBAGAI tugas perdana yang diemban oleh Direktur Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership (CSP) adalah melakukan kunjungan ke anggota-anggota CSP dan para pemangku kepentingan lainnya di sektor kakao berkelanjutan Indonesia. Di awal tahun 2018, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) di Jember menjadi tujuan pertama yang dikunjungi. Dan pertemuan ini juga dihadiri oleh Dr. Ir. Misnawi selaku Direktur Puslitkoka, Dr. Agung Wahyu Susilo, SP., MP., sebagai Kepala Balai Penelitian Kakao, dan Dr. Ir. Soetanto Abdoellah, SU., sebagai Ketua Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo).

Dalam pertemuan tersebut, selain sebagai ajang perkenalan, juga dibahas beberapa agenda penting, yaitu tentang koordinasi kegiatan CSP, Puslitkoka, dan Dekaindo untuk beberapa bulan ke depan, dan berbagi ide tentang akselerasi kakao berkelanjutan di Indonesia dan dunia.

“Kegiatan penting yang akan dilaksanakan oleh CSP beserta anggotanya dalam waktu dekat ini adalah peluncuran Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao, finalisasi Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Bidang Kakao, rencana tindak lanjut lokakarya bahan tanam kakao, dan kegiatan peninjauan ulang road map CSP.” Demikian Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP, menjelaskan pada pertemuan tersebut. “Mengingat nilai penting dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka sangatlah penting bagi CSP untuk membangun koordinasi dengan beberapa pihak terkait yang dirasa berkepentingan di sektor kakao berkelanjutan Indonesia.”

Di kesempatan yang sama, pihak Puslitkoka juga menyampaikan bahwa saat ini telah menghasilkan sebuah paket inovatif yang memadukan antara bahan tanam kakao yang berkualitas dan mekanisasi perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kakao. “Lebih lanjut tentang paket inovatif tersebut akan diumumkan dan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Harapannya adalah bahwa petani bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan cara



KUNJUNGAN KE PUSLITKOKA, JEMBER, JAWA TIMUR

peningkatan produksi kakao,” ujar Dr. Ir. Misnawi. Selain itu, Puslitkoka juga mengutarakan maksud mereka untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan CSP di masa mendatang, misalnya saja kesiapan Puslitkoka untuk menugaskan beberapa tenaga ahli mereka di wilayah-wilayah sentra penghasil kakao untuk memberikan bantuan teknis kepada para petani kakao. Dan ini bisa diharapkan bisa didukung penuh oleh CSP beserta anggotanya.

Berkaitan dengan pengembangan Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao tersebut, Puslitkoka mengharapkan agar CSP beserta anggotanya mampu membangun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, untuk memberdayakan dan memperkuat para tenaga penyuluh lapang. Kegiatan ini juga nantinya bisa melibatkan fungsi Forum Kakao Daerah di wilayah-wilayah sentra penghasil kakao di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, pihak Dewan Kakao Indonesia juga membahas tentang perhatian semua pemangku kepentingan di sektor kakao tentang minat generasi muda terhadap usaha kakao. “Secara bahu membahu, CSP dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Dekaindo tentu saja, haruslah memikirkan secara seksama tentang

bagaimana melibatkan para generasi muda agar ikut serta dan terjun langsung di sektor kakao berkelanjutan dan industri kakao. Dan ini adalah tugas kita semua.” Dr. Ir. Soetanto Abdoellah, SU., sebagai Ketua Dekaindo, mengekspresikan keprihatinan semua pihak di sektor kakao berkelanjutan Indonesia. Lebih lanjut, Ketua Dekaindo menyampaikan, “CSP harus menghimpun juga pelaku usaha kakao berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia.”

Dekaindo juga dengan ini mengundang pihak CSP beserta anggotanya untuk terlibat langsung dalam pertemuan dan diskusi dengan International Cocoa Organization (ICCO) tanggal 22 Januari 2018 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, beragam isu akan dibicarakan oleh para pemangku kepentingan di sektor kakao, dan CSP beserta anggotanya diminta sumbang ide untuk kemajuan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia dan upaya peningkatan kesejahteraan petani dengan cara peningkatan produktivitas kakao. (CSP/AH)



Foto: Armin Hari

PERKENALAN DIREKTUR EKSEKUTIF DAN PEMILIHAN KETUA DEWAN PENGAWAS COCOA SUSTAINABILITY PARTNERSHIP

MENANDAI tahun baru ini, Cocoa Sustainability Partnership (CSP) mengadakan rapat terbatas para anggota Dewan Pengawas. Rapat perdana ini dilakukan di Makassar dengan agenda utama adalah perkenalan Wahyu Wibowo selaku Direktur Eksekutif CSP yang baru, dan sekaligus pemilihan langsung Ketua dan Bendahara Dewan Pengawas untuk periode tahun 2018.

Dalam pemaparannya, Direktur Eksekutif CSP menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas barunya di sektor kemitraan kakao berkelanjutan di Indonesia ini, masih sangat dibutuhkan dukungan dari anggota Dewan Pengawas, anggota umum, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan inisiatif CSP di masa mendatang. *“Direktur Eksekutif CSP yang baru ini adalah harapan yang juga baru untuk membawa CSP ke arah yang lebih baik dan harapan besar kita semua di sektor kakao berkelanjutan agar organisasi ini bisa memiliki ruang di tingkat nasional dan global.”* Imam Suharto selaku Ketua Dewan Pengawas CSP periode 2017 menyampaikan sambutan singkatnya pada proses perkenalan ini.

Selain itu, posisi Cocoa Sustainability Partnership juga sangat diharapkan untuk mengembangkan beberapa tugas penting. Seperti halnya upaya dalam membangun kemitraan yang kuat dengan pihak pemerintah, khususnya koordinasi dan harmonisasi kegiatan dengan ke-

bijakan pemerintah nasional. Terlebih lagi untuk isu yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi tentang kakao berkelanjutan.

Harapan lainnya juga adalah bahwa CSP harus melebarkan sayapnya dan mengembangkan jaringannya ke tingkat lokal dan regional, dan membangun koordinasi dengan asosiasi dan *platform* lainnya di luar negeri. Upaya ini dilakukan agar bisa memungkinkan untuk menjalin kerja sama dan memperoleh wawasan pengalaman dari para negara tetangga tentang upaya mereka dalam mengembangkan produktivitas kakao. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa efektivitas Kantor Sekretariat CSP haruslah menjadi sebuah aset yang kuat dalam menyuarakan suara dari petani agar bisa memiliki gaung yang lebih besar di tingkat lokal dan nasional.

“Di masa mendatang, CSP harus mengupayakan beberapa kegiatan inisiatif yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam road map kakao berkelanjutan. Organisasi ini juga harus memiliki aspek relasi yang kuat dalam melibatkan secara aktif para anggota. CSP juga tetap mengupayakan bagaimana mewujudkan keberlanjutan kakao yang lebih terorganisir, dan dinamis agar organisasi kemitraan ini mampu menjadi contoh bagi model platform lainnya.” Ungkap Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP.

Selain agenda perkenalan Direktur Eksekutif CSP, rapat Dewan Pengawas

ini juga akan menyelenggarakan proses penggantian ketua dan bendahara yang baru untuk periode tahun 2018. Proses pemilihan ini diselenggarakan secara terbatas oleh para anggota Dewan Pengawas, dan dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Untuk bakal calon ketua umum, Ross Jaax dari Swisscontact dan Chandra Panjiwibowo dari UTZ/RA dicalonkan dari para anggota Dewan Pengawas. Dan untuk posisi bendahara, hanya satu orang yang diusulkan, yakni Ani Setyoningrum dari Barry Callebaut.

Bagi para anggota Dewan Pengawas yang hadir, mereka langsung memberikan suara mereka. Namun bagi anggota dewan yang tidak berkesempatan hadir, maka sistem pemilihannya dilakukan dengan cara mengirimkan pesan tentang siapa pilihan mereka ke Ketua Dewan Pengawas sebelumnya.

Setelah melalui proses pemilihan, maka ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Cocoa Sustainability Partnership periode tahun 2018 adalah Chandra Panjiwibowo dari UTZ/RA, dan Bendahara Dewan Pengawas adalah Ani Setyoningrum dari Barry Callebaut.

Sebagai simbolisasi pengalihan kepengurusan, Imam Suharto selaku Ketua Dewan Pengawas periode tahun 2017 menyerahkan beberapa dokumen penting kepada pengurus dewan yang baru dengan disaksikan oleh para anggota dewan pengurus lainnya. (CSP/AH)

TERKAIT dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman kakao di Indonesia yang menjadi target Cocoa Sustainability Partnership (CSP) dan anggotanya, CSP melakukan kunjungan resmi ke Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, untuk mendiskusikan bagaimana pola pengembangan sektor kakao Indonesia saat ini. Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan tentang bagaimana tindak lanjut penerapan program-program pemerintah di sektor kakao di tahun ini dan ke depan. Utusan CSP diwakili oleh Chandra Panjiwibowo selaku Ketua Dewan Pengarah CSP, dan Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif CSP diterima langsung oleh Ir. Bambang, MM., Direktur Jenderal Perkebunan, didampingi oleh Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc., Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc., selaku Kepala Sub Direktorat Tanaman Penyegar.

Di awal pertemuan, Ir. Bambang, MM. secara tegas menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap CSP beserta anggotanya atas segala upaya yang telah dikoordinasikannya bersama pihak pemerintah selama ini untuk memberikan manfaat berupa peningkatan ke sejahteraan petani kakao. “*Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CSP yang telah memberikan dukungan kepada penguatan kakao di Indonesia. Sektor kakao Indonesia ini haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk terus memberikan dukungan kepada petani hingga pelaku usaha, supaya bisa berkelanjutan. Sebab, jika tidak dilakukan hal demikian, maka kakao kita akan terancam.*” Ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia ini.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sektor kakao adalah tanaman budaya dan telah menjadi kehidupan petani. Jika masyarakat petani sendiri kurang memberikan perhatian dan bingung apa yang harus dilakukan, pada akhirnya kakao ini akan ditinggalkan. Padahal jika dipelihara dan dikelola dengan baik, kakao ini sangat menjanjikan. “*Untuk meningkatkan produktivitas kakao seperti yang diharapkan, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharap-*



Foto: Armin Hari

Audiensi Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian: BERUPAYA BERSAMA UNTUK MEMBANGUN SEKTOR KAKAO BERKELANJUTAN INDONESIA

kan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita secara bersama-sama melakukan optimalisasi sumber daya alam yang selama ini belum di-kelola dengan maksimal.” Lanjut Ir. Bambang, M.M. Sektor kakao Indonesia hampir 100% adalah berupa kakao rakyat dengan keterbatasan kemampuan petani berskala kecil. Dan mengingat hal tersebut, semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan kakao berkelanjutan ini bertanggung jawab untuk memberikan perhatian pada keberlanjutan kakao. Pemerintah menjadi komandan untuk memfasilitasi, didukung oleh berbagai pihak, baik swasta, perbankan, dan dunia usaha. Dan pihak petani kakao sendiri harus didorong dan didampingi dalam melaksanakan kerja keras tersebut.

Dalam arahannya pula, Direktur Jenderal Perkebunan menyampaikan keinginannya agar para pemangku kepentingan di sektor kakao bahu-membahu satu sama lain untuk mencoba melakukan perbaikan kakao rakyat di wilayah-wilayah tertentu. Pihak pemerintah daerah juga harus dilibatkan beserta pihak lainnya. “*Lokomotif pembangunan sektor kakao adalah kegiatan kunci dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Tindak lanjut yang diharapkan adalah masing-masing pihak di sektor ini seharusnya membangun koordinasi*

dengan pemerintah pusat. Sehingga masing-masing pihak tersebut bisa mengupayakan kegiatan mereka secara harmonis dengan kebijakan dan program pemerintah.” Kata Ir. Bambang, M.M. Program-program dari pemangku kepentingan lainnya bisa dijalankan secara berdampingan dengan kebijakan pemerintah. Dan CSP beserta anggota-anggotanya bisa mengisi program pemerintah tersebut dari segi pemberdayaan petani kakao di sentra-sentra produksi kakao.

Direktur Jenderal Perkebunan pun menyadari bahwa sangatlah sulit untuk meyakinkan banyak pihak bahwa pembangunan sektor perkebunan adalah langkah penting. Padahal mengingat kontribusi perkebunan secara nasional sangat besar. Tahun 2017 saja, diketahui ada sekitar 429 trilyun rupiah kontribusi 15 komoditas sektor perkebunan PDB. “*Ini dengan kondisi perkebunan rakyat yang belum terkelola dengan baik. Semua produktivitasnya pun masih jauh dari harapan, dan masih memungkinkan untuk dikembangkan jauh lebih besar. Tapi untuk meyakinkan semua orang, bahwa ayo kita jadikan perhatian dalam membangun perkebunan menjadi komitmen kita bersama, masihlah sulit.*” Ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Cocoa Sustainability Partner-

ship mengungkapkan bahwa hasil dari pertemuan ini akan dikembangkan lebih lanjut ke anggota-anggota CSP. Mulai dari sektor swasta hingga forum-forum kakao, supaya bisa berkolaborasi bersama dengan program pemerintah. “*Intinya adalah apa yang menjadi komitmen tetap kita harus laksanakan, agar kegiatan yang sepotong-sepotong tersebut bisa disatukan. CSP juga memiliki komitmen yang tinggi untuk bagaimana kami bisa membantu dan terlibat aktif dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian seperti yang sudah dilakukan, yaitu mendukung penyusunan nasional kurikulum tanaman kakao, penyusunan rekomendasi unsur hara tanaman kakao, dan bagaimana petani kakao bisa mendapatkan bahan tanam berkualitas dan bersertifikat.*” Ungkap Wahyu Wibowo.

Chandra Panjiwibowo selaku Ketua Dewan Pengawas Cocoa Sustainability Partnership juga menyampaikan bahwa tujuan didirikannya CSP adalah adanya kenyataan bahwa masing-masing pemangku kepentingan bekerja sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi, dan hasilnya pun tidak optimal. Oleh karenanya, sebuah kemitraan dalam wadah CSP ini sangatlah diperlukan. “*Kemitraan yang dibangun, dengan Kementerian dan Kemenko Bidang Perekonomian ada di dalamnya, diharapkan kita bisa bergerak bersama. Saat ini kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap CSP dengan struktur yang sekarang. Dalam struktur CSP, ada Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan keterlibatan sektor industri dan trader sebagai anggota. Apakah keterwakilan ini sudah mampu mengkoordinasikan hal tersebut? Ke depan, program dari Kementerian, industri, dan trader harus ditingkatkan sinergi dan koordinasinya dalam bentuk pertemuan rutin dengan melibatkan semua pihak sehingga bisa diidentifikasi kegiatan apa saja yang perlu dilakukan, pihak mana yang mampu menuhninya, dan bagaimana melaksanakannya di lapangan.*” Demikian Chandra Panjiwibowo menjelaskan.

Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc., Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc., selaku Kepala Sub Direktorat Tanaman Penyegar, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia sendiri menyampaikan perhatian pada persoalan data di Indonesia. Pertemuan koordinasi dengan ICCO selaku organisasi kakao tingkat global beberapa waktu lalu memaparkan perbedaan hasil metodeologi pendataan yang selama ini dilakukan. “*Data mereka menunjukkan bahwa produksi kita kembali turun, hanya 290.000 ton dari 410.000 ton pada tahun 2013. Ini adalah hasil dari metodeologi mereka. Tapi kami juga mengembangkan metodeologi sendiri. Dan saya pikir bahwa ini bisa didukung oleh CSP melalui forum kakao daerah.*” Kata Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc.. Kegiatan pengumpulan data tersebut bisa dikordinasikan dengan fungsi forum kakao daerah di beberapa tempat di Indonesia. Melalui forum-forum kakao daerah tersebut, lembar isian akan disebar ke petani kakao untuk merekam jumlah produksi mereka selama kurun waktu tertentu. Dan diharapkan bahwa kegiatan pendampingan pun bisa dilakukan bersamaan, dan pengumpulan data yang lebih akurat. Pihak Direktorat Jenderal Perkebunan pun sudah memiliki desain pencatatan tersendiri, dan CSP bisa mendukung

dengan jaringannya yang luas di Indonesia.

“*Saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan IPB untuk metodologi, sehingga nantinya kita bisa membuat model yang berasal dari pengamatannya selama tiga tahun dan periodik. Kemudian arahnya untuk membuat statistik yang bisa memberikan prediksi jumlah produksi untuk kurun waktu tertentu di masa mendatang.*” Kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar ini.

Di akhir pertemuan, Ir. Bambang, MM. kembali menegaskan penghargaannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh CSP dan anggota-anggotanya untuk pengembangan sektor kakao yang berkelanjutan. Menurut beliau, sekecil apapun dukungan yang diberikan untuk peningkatan dan perbaikan produktivitas kakao di Indonesia, adalah baik. Berhubungan dengan peningkatan mutu dan daya saing kakao nasional, Direktur Jenderal Perkebunan menawarkan penerapan dari dua regulasi yang ada selama ini. Pertama adalah mewajibkan SNI tentang standarisasi mutu. “*Permentan No. 67 dirasa terlalu berat sehingga petani tidak bisa melakukan fermentasi. Harus melapor ke sana ke mari hanya untuk melakukan fermentasi. Jangan berbuat untuk mengajak kebaikan dengan sederetan kesulitan. Dan ini sedang disempurnakan untuk kemudian kita wajibkan.*” Ujar Ir. Bambang, MM.. Hal kedua yang diharapkan adalah bahwa setelah produksi kakao Indonesia sesuai dengan standar nasional, maka hasil dari masing-masing komoditas pun bisa dihimpun dan dikembalikan lagi ke komoditas tersebut. Setiap ekspor produk kakao, ada regulasi pungutan dalam hal biaya keluar. Dan hasil dari biaya keluar itu dikembalikan lagi ke sektor kakao. Tidak dialokasikan ke sektor lainnya. Hal tersebut bisa saja dilakukan menurut Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.

“*Jika di sektor kakao bisa dilakukan seperti itu, perkebunan akan menjadi mandiri dan tidak membebani APBN. Dan ini yang perlu dibicarakan, tidak perlu malah berfokus pada hal-hal kecil yang sifatnya teknis. Jika CSP dan anggotanya bisa memfasilitasi agar muncul kebijakan yang memberikan kebaikan manfaat bagi semua pihak, itu luar biasa.*” Lanjut Ir. Bambang, MM.

Dan di penghujung pertemuan ini, Direktur Jenderal Perkebunan menyampaikan harapannya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota CSP. “*Sayang sekali jika CSP dan anggotanya yang bekerja dengan sumber dayanya masing-masing, kurang memberikan manfaat langsung kepada petani. Dengan diskusi seperti ini bisa lebih mengarahkan kegiatan ke depannya yang lebih sinergis. Dan berorientasi pada kepentingan yang memang mendesak.*” Tutup Ir. Bambang, MM. (CSP/AH)



**Audiensi dengan Direktur Perbenihan Perkebunan,
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian:**

MEMBERIKAN AKSES KEPADA PETANI KAKAO TERHADAP BAHAN TANAM BERSERTIFIKAT DAN BERKUALITAS

KETERSEDIAAN bahan tanam yang berkualitas dan bersertifikasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan sektor kakao berkelanjutan di Indonesia melalui peningkatan produksi dan produktivitas kakao. Dan isu yang dirasa sangat berhubungan dengan persoalan bahan tanam kakao tersebut adalah ketersediaan dan keterjangkauan bahan tanam yang berkualitas bagi petani. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya permintaan petani akan bahan tanam tersebut.

Di sisi lain, informasi tentang sumber benih, baik itu kebun induk dan kebun entres, dan ketersediaan jumlah bahan tanam bersertifikat di Indonesia tidak begitu merata di para pemangku kepentingan sektor kakao. Berdasarkan data dari Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, jumlah sumber benih bersertifikat di Indonesia pada tahun 2017 adalah 24 sumber. Dari jumlah tersebut terdiri dari 21 kebun induk dan 3 kebun entres, dan tersebar di 17 kabupaten/kota di Pulau Sumatera

ra dan Jawa. Hanya ada masing-masing satu sumber bahan tanam yang tersedia di Pulau Sulawesi dan Papua. Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa masih ada celah kekurangan jumlah bahan tanam kakao yang bersertifikat, khususnya di daerah sentra-sentra produksi kakao di Indonesia.

Mengingat isu ini sangatlah penting, maka pada awal Agustus 2017 silam, Cocoa Sustainability Partnership dengan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, dan Dewan Kakao Indonesia, menyelenggarakan lokakarya penyediaan bahan tanam kakao berkualitas untuk mendukung para petani dalam memperoleh bahan tanam dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di sektor ini. Tujuan penyelenggaraan lokakarya tersebut sendiri adalah untuk memastikan bagaimana para petani kakao memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan mereka akan bahan tanam berkualitas dengan mengacu pada kesesuaian lokalitas, bagaimana membangun kolaborasi dalam mendukung kebun benih, kebun induk, dan perbenihan agar mampu

memenuhi persyaratan standar bahan tanam bersertifikat sesuai dengan regulasi pemerintah, dan bagaimana mengidentifikasi peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di sektor kakao untuk mewujudkan akses petani terhadap bahan tanam kakao berkualitas tersebut.

Sehubungan dengan sosialisasi dan harmonisasi rekomendasi lokakarya tersebut, Cocoa Sustainability Partnership pun berkunjung dan melakukan diskusi dengan Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, beberapa waktu silam. Tim CSP yang terdiri dari Wahyu Wibowo selaku Direktur Eksekutif CSP, Imam Suharto sebagai perwakilan anggota Dewan Pengawas CSP, dan A. Muhammad Amin dari kantor eksekutif CSP, diterima langsung oleh Ir. H. Muhammad Anas, Direktur Perbenihan Perkebunan.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan bahwa program utama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, saat ini adalah membangun Desa Mandiri Benih. *"Program pemerintah nasional ini harus dimulai dengan penguatan sumber daya petani dan kelembagaan petani itu sendiri. Jika kedua hal tersebut telah terbangun, maka organisasi petani akan memiliki kemampuan dan komitmen dalam menjadikan kebun benih sebagai unit usaha, dan juga memampukan mereka untuk bisa memenuhi persyaratan regulasi pengaturan kebun benih."* Demikian Ir. H. Muhammad Anas menuturkan program pemerintah tersebut.

Direktur Perbenihan Perkebunan juga memberikan usulan kepada CSP untuk melakukan identifikasi petani, atau kelompok tani, yang selama ini mengupayakan kebun benih sebagai unit usaha mereka di wilayah-wilayah anggota CSP bekerja di Indonesia. Jika sudah ada data persebaran kebun benih yang dikelola oleh petani atau kelompok tani, maka tugas Direktorat Perbenihan Perkebunan adalah memacu mereka dengan memperkuat kelembagaan petani agar mampu memenuhi persyaratan yang telah diatur sebelumnya oleh Kementerian Pertanian, khususnya



sertifikasi benih sebagai bahan tanam berkualitas.

Kolaborasi ini sendiri bisa dibangun antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dan Cocoa Sustainability Partnership sebagai wadah berkumpulnya para pemangku kepentingan di sektor kakao berkelanjutan di Indonesia. Pihak pemerintah akan mengambil peran dalam penyediaan pengetahuan tentang model dan penguatan kelembagaan petani menyangkut regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. CSP sendiri akan berfungsi sebagai fasilitator pertemuan-pertemuan teknis yang mempertemukan pemerintah dengan para produsen benih dan kelompok tani di sentra-sentra produksi kakao di Indonesia.

Pertemuan teknis tersebut akan membahas tentang proses sosialisasi Direktorat Perbenihan Perkebunan tentang regulasi, proses, dan tahapan yang diwajibkan dalam mengembangkan kebun benih. Selain itu, pihak Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, atau anggota CSP lainnya, menjelaskan tentang teknologi perbenihan yang bisa dilakukan di tingkat kelompok tani. Namun harapannya adalah bahwa pertemuan teknis tersebut haruslah menghasilkan sebuah persetujuan bersama tentang rencana kerja, keluaran, dan deskripsi keuntungan yang bisa diperoleh oleh petani dan kelompok tani.

"Kelompok tani ini akan menjadi cikal bakal program kolaborasi antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dan Cocoa Sustainability Partnership nantinya. Jika kelompok tani tersebut

mampu membangun kebun benih sesuai standar, maka Direktorat Jenderal Perkebunan akan membantu proses sertifikasi kebun benih tersebut." Ujar Ir. H. Muhammad Anas. Dikatakan pula bahwa Direktorat Perbenihan Perkebunan juga menginformasikan kemungkinan pengembangan kebun benih bersertifikasi yang dimasukkan dalam program pemerintah menyangkut akses perhutanan sosial yang melingkupi empat komoditas, yakni kakao, kopi, karet, dan pala. Program ini sendiri juga akan mempercepat kebun benih untuk diajukan sebagai unit usaha.

Selain itu, pihak Direktorat Perbenihan Perkebunan juga akan memperbaharui data-data persebaran sumber-sumber bahan tanam kakao bersertifikat di Indonesia untuk kemudian digunakan oleh CSP dan anggota-anggotanya dalam mendistribusikan pengetahuan akses bahan tanam tersebut. *"Hasil dari pertemuan ini akan kemudian CSP sebarluaskan kepada anggota-anggota CSP dan para pemangku kepentingan lainnya, dan juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Harapannya adalah hasil dari pertemuan ini bisa diwujudkan dalam bentuk rencana inisiatif kolaborasi antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dan CSP. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana melakukan pengembangan dan pemberdayaan para produsen benih kakao bersertifikat, dan menjadikan upaya ini sebagai unit usaha kelompok tani di masa mendatang."* Demikian tutup Wahyu Wibowo, Direktur Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership. (CSP/AH)

Lokakarya Nasional
Memperkuat Dukur
Kepentingan untuk
Muda dalam Produk
Berkelanjutan mere
dukungan melalui p
formal dan non-form
generasi muda untu
sektor kakao; dan n
informasi kepada g
pemangku kepenting

PEMERINTAH PUSAT

Kolaborasi dan koordinasi terpadu yang terbangun baik dengan pemerintah.

AUDIT KEUANGAN

Audit Keuangan yang dilaksanakan oleh PwC dengan opini bahwa pencatatan keuangan CSP telah dipersiapkan dengan baik, dalam hal materi yang berkaitan dengan basis akuntansi keuangan.

REKOMENDASI RASIO PUPUK PENGGANTI UNSUR HARA

Gugus Tugas Agro-Input dan Bahan Tanam telah menghasilkan Rekomendasi Rasio Pupuk untuk Pengganti Unsur Hara.

KURIKULUM NASIONAL DAN MODUL PELATIHAI

Hasil yang dicapai oleh Gugus Tu Kurikulum Kakao Nasional adalah fasilitasi badan pengarah dan tim penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan Kurikulum Nasional Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen K



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas



ICCR



SULAWESI BARAT



SULAWESI SELATAN



ASKINDO

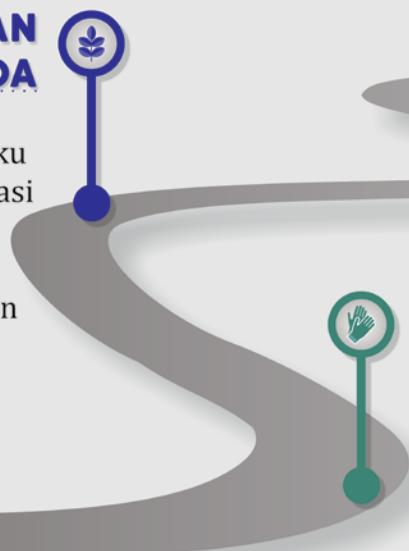


INTERNATIONAL SERVICES



KETERLIBATAN GENERASI MUDA

tentang
 dengan Para Pemangku
 Melibatkan Generasi
 kksi Kakao
 ekomendasikan
 program pendidikan
 mal; memacu
 ik terlibat dalam
 menyediakan
 generasi muda dari
 ngan.



AKSES TERHADAP BAHAN TANAM BERSERTIFIKAT

Sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bahan Tanam “Meningkatkan Akses Petani terhadap Bahan Tanam”, CSP beserta anggotanya telah mengidentifikasi sekitar 514 kebun benih di seluruh Indonesia yang berpotensial untuk diajukan dalam memperoleh sertifikasi.



FORUM KAKAO DAERAH

Forum Kakao Daerah yang berkontribusi secara aktif dan mengadvokasi sektor kakao berkelanjutan di tingkat regional, telah berhasil memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam hal pengembangan sektor kakao, menginisiasi pembagian sertifikat tanah bagi petani kakao, dan membangun dialog yang intensif antara forum kakao daerah dengan petani.



PENCAPAIAN UTAMA TAHUN 2017



FORUM KAKAO ACEH



World Cocoa Foundation

BARRY CALLEBAUT

Cargill™

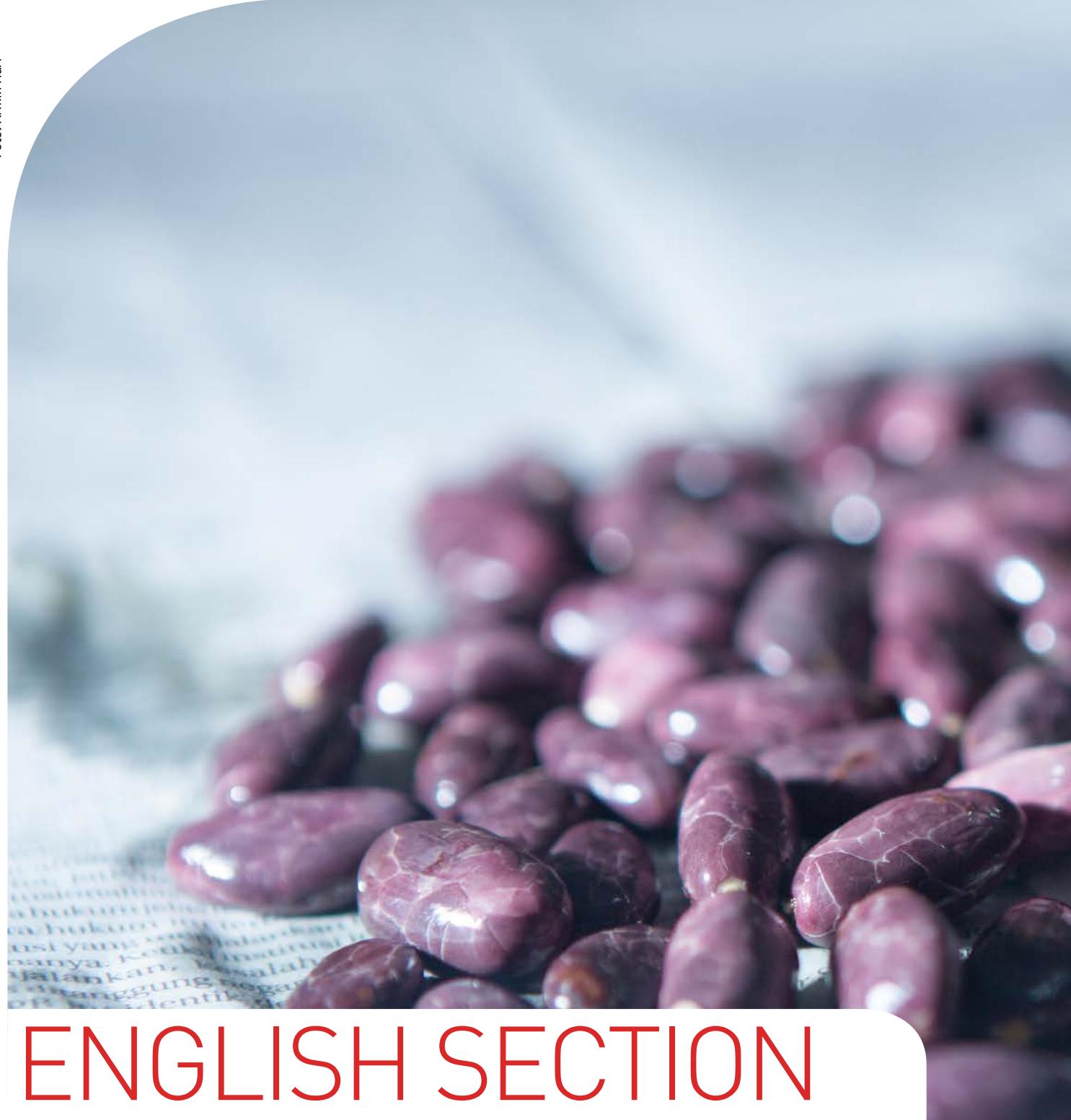
Delfi®
LIMITED

MARS
incorporated

Mondelēz
International

Nestlé
Cocoa Plan

Olam
Cocoa



ENGLISH SECTION

41

OPINION
Cocoa Farmers
Overestimate their Farm
Size

44

MAIN REPORT
Fertilizer Nutrient
Ratio for Nutrient
Replenishment

48

EXECUTIVE OFFICE
A New Spirit for
Indonesian Sustainable
Cocoa

50

MEMBER PROFILE
Kalimajari Foundation
and Sustainable Cocoa
in Jembrana Regency

58

MAIN REPORT
The Launching
Ceremony of National
Curriculum and Training
Modules for Sustainable
Cocoa Cultivation



63

EXECUTIVE OFFICE
Introduction of Executive
Director and Election
of Supervisory Board
Chairperson of Cocoa
Sustainability Partnership

64

EXECUTIVE OFFICE
Working Together in
Establishing Sustainable
Cocoa Sector in Indonesia

66

EXECUTIVE OFFICE
Providing Access for
Cocoa Farmers to
Certified and Qualified
Planting Materials

NATIONAL CURRICULUM AND TRAINING MODULE FOR SUSTAINABLE COCOA CULTIVATION AND POST-HARVEST.

ONE of the task forces which is established by Cocoa Sustainability Partnership (CSP) is National Cocoa Curriculum Task Force. This task force is mandated to compile a national document in form of National Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest in order to make it available and used by public, especially it can be utilized by agricultural extension providers, such as government, private, and independent extension staffs.

The objective of this national curriculum and training module arrangement is to harmonize the current available manuals and applied by CSP members, with the Government Decree and it is aimed that this national document can be functioned as a reference for those manuals. And during the processes, CSP is established cooperation and collaboration with the Center for Agricultural Training, Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture (BPPSDMP), Ministry of Agriculture. The processes itself is relatively long and it is conducted within 2017, and launched officially on February 2018. Along the arrangement activities of the national curriculum and training module is paralleled with the establishment of the National Working Competency Standards (SKKNI) for Sustainable Cocoa.

In other hand, the Agro Input and Planting Material Task Force also had showed its performance during 2017. And one of the achievements of CSP members, as members of this task force, is the announcement of a recommendation on Fertilizer Nutrient Ratio for Nutrient Replenishment. The expectation is that this recommendation can be applied by public in providing efforts and answers on recommendation of specific fertilizers for cacao plantation which is relatively difficult to be found in the field.

In this edition, Editorial of COKELAT delivers the implementation processes of these two significant activities to the wider audiences. And they are the fruits of coordination and collaboration which had been established by members of Cocoa Sustainability Partnership with various stakeholders, particularly the national government. The long term objective of these activities is to increase the welfare of smallholders cocoa farmers through improvement on cocoa production and productivity.

This first edition of COKELAT Magazine in 2018 also describes the profile of new member of Cocoa Sustainability Partnership, i.e. Kalimajari Foundation in Bali. With various achievements on sustainable cocoa development, Kalimajari Foundation has shown its willingness to work together with national and global stakeholders in developing the cocoa sector in Indonesia, and working hand in hand with other stakeholders in ennobling the cocoa farmers through farmers' welfare improvement.

Another significant issue that COKELAT Magazine coverages in this edition to its members is the in-depth introduction of a new directing actor of Cocoa Sustainability Partnership as Executive Director. With abundance experience, it is believed that Wahyu Wibowo will deliver his best efforts with the supports of sustainable cocoa sector stakeholders in Indonesia to move forward with the farmers to the global scope.

Furthermore, Editorial of COKELAT also explains some important activities during this period. As mandated, Cocoa Sustainability Partnership works together with its members in providing facilitation to develop Regional Cocoa Forum in some areas. And during the implementation processes, CSP initiates to prepare the independencies of Regional Cocoa Forum in the future.



Cocoa Farmers Overestimate their Farm Size: IMPLICATION FOR YIELD ESTIMATES AND CERTIFICATION VOLUMES

Foto: Armin Hari

Dr. Dirk Lebe

*Team Leader Agribusiness Financing Facility
and Deputy Program Director
Sustainable Cocoa Production Program*

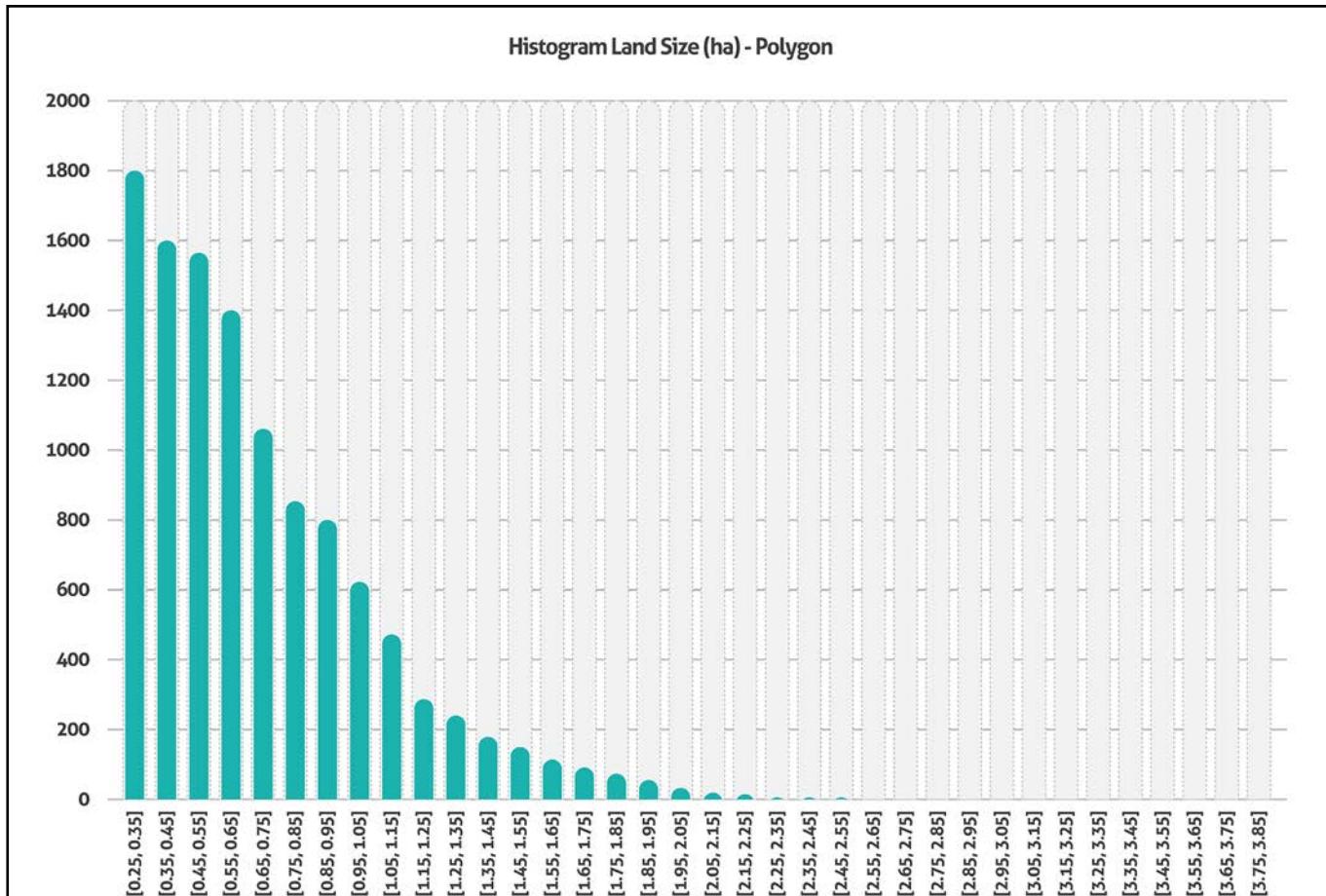
Short Summary

SCPP data shows that cocoa farmers in Indonesia are overestimating their land size by at least 25% on average. This is especially true for farm sizes of one hectare or below, where overestimation is 45.6% (0.83 ha self-reported vs. 0.57 ha polygon-measured). On the contrary, farmers with cocoa plot sizes above one hectare, underestimate their land size by 15.7% (1.21 ha self-reported size compared to 1.4 ha polygon-size).

The analysis showed that farmers who report their land to be one-hectare or less are probably overestimating their land sizes significantly, which has an impact on reported

yields per hectare. This suggests that cocoa farms throughout the country are smaller than normally considered to be, hence average yields per hectare are larger than reported. More emphasis should be given to measure land sizes more accurately, e.g. through walking around the farmer's land and mapping the borders with polygons.

Yield estimates based on the land area suggested by farmers might be systematically overestimated by 20-30%, assuming that farmers measure their yields more accurately than they measure their land. That land size estimate should be discounted until polygon data can be collected and compiled to verify the farmers' estimates.



The Long Version

Swisscontact's Sustainable Cocoa Production Program in Indonesia has trained more than 134,000 cocoa farming households on Good Agricultural Practices (GAP), Good Nutritional Practices (GNP), Good Environmental Practices (GEP), Good Financial Practices (GFP) and other topics. The Program has collected a wealth of data from each household and uses that data to shed some light on issues that are usually unknown. This short article looks at farms that were surveyed using a GPS device that produced a polygon representing the farm's actual size and dimensions. SCPP used a sample size of 11,646 cocoa farms, which have been mapped with a polygon in six Indonesian provinces in Sulawesi and Sumatra.

The data shows that farmers are overestimating their land size on average by 25% (0.9 ha self-reported, while the surveyed polygons measured 0.72 ha). This is especially true for farm sizes of one hectare or below, where overestimation is 45.6% (0.83 ha estimated vs. 0.57 ha measured). On the contrary, farmers with cocoa farm sizes above one hectare, underestimate their land size by 15.7%.

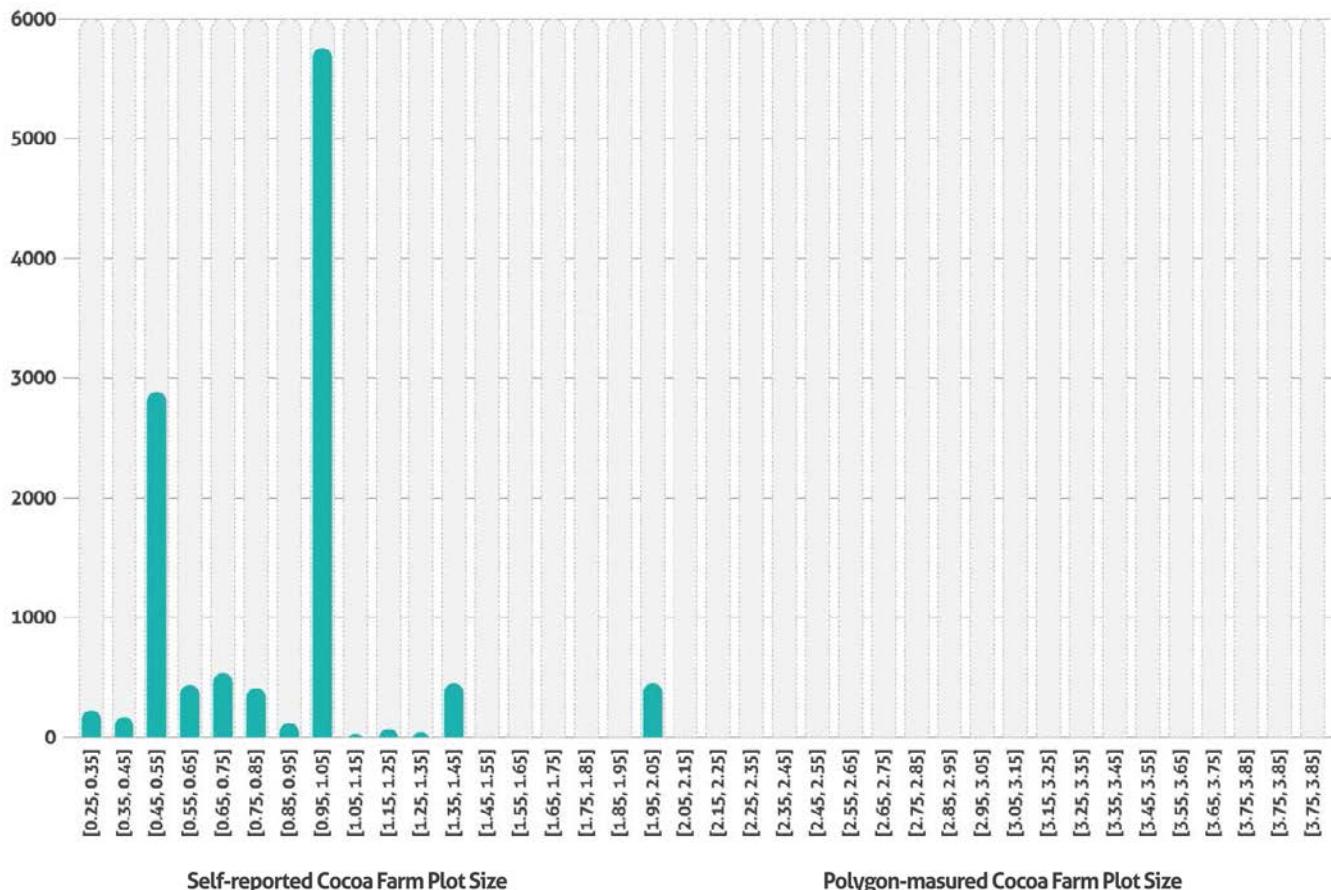
Farmers without a formal land title perform equally weak in estimating their own land size than farmers who have a formal land title. However, this might be caused by the fact that not the entire land is used for one crop only, so the farmers still have to estimate the share of their land used for cocoa farming. Being located on slopes or non-rectangular plot shapes will make the estimation process additionally complex.

Estimation is strongly biased. Self-reported land sizes in 79.1% of the cases were rounded to equal 0.5, 1, 1.5 and 2 hectares, while the land sizes measured with polygons were more evenly distributed, as expected.

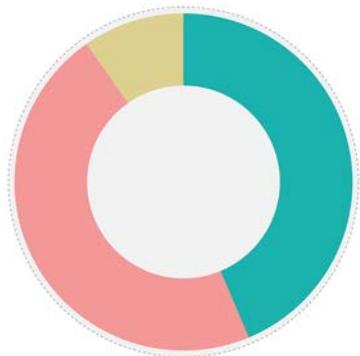
A majority of farmers estimate their land to be exactly one hectare or more (57.2%). However, only 18.9% of land is one hectare or more based on the polygon measurements. Out of the 18.9% of farms that are one hectare or more, 1.7% are two hectares or more.

The analysis showed that farmers who report their land to be one-hectare or less are probably overestimating their land sizes significantly, which has an impact on reported yields per hectare, assuming that farmers measure their yields more accurately than they measure their land. This suggests that cocoa farms throughout the country are smaller than normally considered to be,

Histogram Land Size (ha) - Self-reported

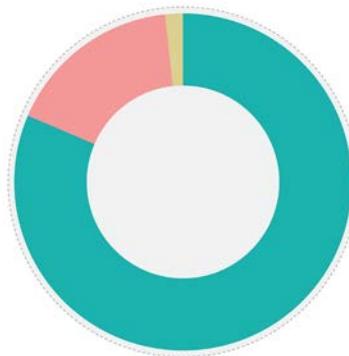


Self-reported Cocoa Farm Plot Size



● < 1ha ● 1-2 ha ● > 2ha

Polygon-measured Cocoa Farm Plot Size



● < 1ha ● 1-2 ha ● > 2ha

hence average yields per hectare are larger than reported. More emphasis should be given to measure land sizes more accurately, e.g. through walking around the farmer's land and mapping the borders with polygons. Collect-

ing more accurate data is useful for all stakeholders in the cocoa sector and important for policy makers. In a subsequent article, we will look at self-reported yields compared to real transactions. (SCPP/DL)



Fertilizer Nutrient Ratio for Nutrient Replenishment: GUIDELINES AND PRINCIPLES FOR THE CHOICE OF APPROPRIATE FERTILIZER FOR COCOA

Prepared by Task Force Agro Input and Planting Material Co-coa Sustainability Partnership and had been distributed at CSP General Assembly Meeting, on August 09, 2017.

Purpose and Rationale of This Document

This document describes the ratio of all nutrients that must be present in a “cocoa fertilizer package for complete nutrient replenishment and soil pH management”.

Why Nutrient Replenishment

Every “mt” of dry cocoa beans and its’ pod husks remove 129 - 143 kg of nutrients from the farm, and the only nutrient that can partially be brought back to a cocoa farming system is Nitrogen. All other nutrients including the bulk of nitrogen must be brought back to the farm by the farmer either as (large volume) organic material or as concentrated

nutrients such as fertilizer. If nutrients are not replenished, the soil will be depleted of nutrients, the farm will produce less and less and tree health will decline. It takes significant funding and effort to bring such soils back to high fertility, not only for the cultivation of cocoa but for other crops as well. The biggest single asset for a farmer is his land and the fertility of his land, whilst soil fertility is one of the major drivers of high productivity and thus high income. Nutrient replenishment is therefore necessary both for short and long term high Return on Investment (ROI) as well as protection and appreciation of the farm land asset.

Why Nutrient Replenishment by Fertilizer

Nutrients can be replenished by raw or processed organic material and animal manure, but typically nutrients in the raw organic material are present in very low volume and poor ratios whilst they are present in low volume and poor ratio in compost and organic fertilizer. Animal manure is typically very high in some nutrients but low in others. It is possible but difficult to bring all nutrients that a cocoa tree needs in the right ratios through raw or processed organic material or animal manure and the large volumes needed and the labor associated with it, as well as low availability of some materials in different areas pose issues for comprehensive nutrient replenishment through organic material and animal manure. Fertilizer, on the other hand, are concentrated minerals which are easy to handle with fairly low labor cost, whilst they are easy to blend for the right ratios and can be purchased whenever needed. Some organic material is absolutely necessary for soil health, but good quality fertilizer is the most efficient way to replenish nutrients.

Purpose and Audience of This Document

This document should help farmers, extension workers, farm service providers, company service providers to farmers and the fertilizer industry to select appropriate fertilizers that deliver a good ROI both on the short and long term - which implicitly means that long term soil fertility needs to be taken into consideration.

The Rationale for This Document and Its Information

CSP realizes that the understanding of soil condition, soil chemistry, plant physiology and optimization of agricultural practices leading to the right choice of fertilizer is very complex and potentially confusing. This document tries to simplify these choices by using a few principles and existing knowledge and understanding of fertilizers for cocoa and deliver to the audience a simple table of specifications that a

good cocoa fertilizer should meet. For this reason, we have chosen not to use volume or weight indicators for nutrients in fertilizer but rather the ratios as these are most commonly used in the fertilizer industry, and are most visible to farmers and others.

How to Use This Document

The main information in this document is a table that prescribes the ratio of nutrients in fertilizer for full replenishment and absorption of these nutrients by the cocoa tree. The ratios are used in the same way as they are shown on a fertilizer bag to avoid confusion. For each nutrient, there is a 'range' in the ratio and all nutrients must fit in their ratios.

For example, a simple N-P-K fertilizer described at 15-15-15 contains 15% N, 15% P and 15% K and 55% filler. A complete cocoa fertilizer with Ammonia N (which is not desirable) could be described as N-P-K-MgO-CaO-S-B-Zn with 12% N, 14%P, 15%K, 4% MgO, 5% CaO, 3% S, 0.7%B and 0.6%Zn. Whilst the nutrient content meets all specifications, the application of N as ammonia (as is nearly always the case in NPK fertilizers) makes this a less desirable choice. Such fertilizer should be accompanied by a significant volume of lime or dolomite to off-set the acidification caused by Ammonia-N.

A more desirable 'fertilizer package' is one where N is applied separately (i.e. Calcium Nitrate CaNO₃) which delivers N as well as Ca, often in ratios of 15% and 20%. The other nutrients are now applied with zero or very low-level N in a separate formulation such as N-P-K-MgO-CaO-S-B-Zn with 0% N, 18%P, 22%K, 5% MgO, 10% CaO, 4%S, 0.7%B and 0.6%Zn. This fertilizer package meets all the specs for a good fertilizer and doesn't acidify the soil.

Note that even the most effective formulations will typically not exceed 60% of nutrient content with 40% filler, but this filler is important for the production and use of the fertilizer.

Determining Choice of Fertilizer and Volume to Use

How to Determine the 'Best Specification for a Farm'

The 'best formulation' is partly tied to known soil deficiencies or naturally high levels of some nutrients. If it is known that a soil has a high level of P or that P is relatively soluble in this particular farm, a formulation with lower P could be chosen. In most cases such levels aren't known, and whilst any of the ratio combinations will still deliver an acceptable volume of nutrients it is recommended to choose a fertilizer with ratios in 'mid-range'. Note that for highly productive farming systems of 1.5 mt/ha or more, a higher ratio of K is recommended.

Volumes of Fertilizer to Use

Between 129 - 143 kg of nutrients are needed in fertilizer to compensate the nutrients exported in 1 mt of dry cocoa beans and the accompanying pod husks. Assuming 50% filler and 20% loss of fertilizer through seepage and runoff, we need to apply 400 kg of fertilizer for yield of 1 mt of dry beans. To compensate for yield of 2 mt/ha we need to use 700 kg of fertilizer (nearly double the dose).

Background to CSP and the Nutrient Replenishment Work

Most cocoa in Indonesia is produced by small holder cocoa farms all over the country, with most cocoa grown in Sulawesi and Sumatra. Most farmers are slowly improving their "Good Agricultural Practices" to a more professional level and many farmers have started or are considering to renovate their farms with highly productive plant material - but unfortunately nearly all farmers still use Urea and NPK fertilizers which over time acidifies the soil and drives imbalance of nutrients, which impacts the production capacity of the tree severely.

To grow cocoa successfully, farmers must not only use highly productive plant material and professional agricul-

tural practices, but they must also manage their soils professionally. Many soils need restoration of pH to levels of 5.8 or higher through the use of large volumes of lime or dolomite, whilst some soils are deficient in Soil Organic Matter and low microbiological activity and thus need organic matter, compost or organic fertilizer. Additionally, to ensure availability of nutrients in the soil for cocoa trees to thrive and support high yield, special ‘cocoa fertilizer’ must be used to replenish or top up all macro, secondary and micro nutrients that are removed from the soil with every harvest. Such fertilizer should contain the minerals N, P, K, Ca, S, Mg, Zn, and B in the right ratios (balance), whilst N should not be applied as Ammonia but rather as Nitrate to avoid ongoing acidification of the soil.

Fertilizer is used for many crops in Indonesia, and for some crops, a certain volume of fertilizer is subsidized. There is a moderate volume of subsidized fertilizer for cocoa which is all NPK fertilizer in ratios such as 15-15-15 or 20-10-10 which acidifies the soil and does not contain secondary or micro nutrients but as it is cheap, this fertilizer is popular with farmers. PT. Pupuk Indonesia is a state-owned fertilizer that dominates the market (and delivers the subsidized NPK fertilizer) but there are a number of small to medium size private fertilizer companies as well whom are willing to explore opportunities to sell specific ‘cocoa fertilizer’.

CSP Actions

Together with ICCRI and other members, the CSP has developed a table with nutrient ratios for each nutrient in a nutrient replenishment fertilizer for cocoa, rather than publish recommendations for fertilizer formulations. Clearly it is not the role of CSP to approve, endorse or recommend fertilizers but more importantly such ‘fixed formulations’ would hamper the fertilizer industry to service farmers with new, better and more affordable fertilizers which would still be appropriate but would differ slightly from the CSP recommendation.

Table 1. Nutrients Replenishment Fertilizer Ratio for Cocoa.

Parameter	Unit	Thresholds	
		Low	High
Macronutrients			
No3- (in Nitrate form)	% in blend	12	18
P2O5	% in blend	12	20
K2O	% in blend	15	25
Secondary Nutrients			
MgO	% in blend	3	8
CaO	% in blend	5	tinggi
S	% in blend	3	10
Micronutrients			
B	% in blend	0.6	1
Zn	% in blend	0.4	0.9
Mn	% in blend		
Mo	% in blend		
Fe	% in blend		
Cu	% in blend		

Source of Data

The Nutrient Replenishment Table specifies the range of ratios for nutrients that should be included in a ‘complete cocoa fertilizer’ or in a ‘fertilizer package’. The ratios are based ‘nutrient replenishment’ as measured in nutrients removed in cocoa beans and cocoa pod husks from a number of studies in a number of countries. These nutrient replenishment data are then adjusted for typical soil activities (i.e. seepage or leakage of different nutrients) and typical chemical interactions in the soil. The data used for this table are from Indonesia, Malaysia, Ghana, Cameroon, Nigeria and Ecuador which ensures that compensation for a variety of soil and farm conditions are included.

Over time, new insights will develop which will allow CSP and its’ members to fine-tune or change some of the nutrient ratios as mentioned.

Soil Fertility, Fertilizer, Nutrient Replenishment and Nutrient Ratio

Soil conditions and nutrient availability in soils vary depending on the soil, the climate, the crop, the years of cultivation on the soil and the soil management practices used:

- Some soils are not suitable for cocoa production and other crops should be grown on such soils.
- Some soils are suitable for cocoa but have low levels of organic matter and microbiological activity, or the soils have a low pH, or the soils are depleted of nutrients or have an imbalance of nutrients through long term cultivation of a crop with no or poor soil management

practices, or a combination of these issues. Ideally, such soils should be ‘restored’ by applying more of the inputs that are needed most to reach a soil with good pH, good microbiological activity as well as good nutrient availability in the right balance.

- Some soils are directly suitable for cocoa cultivation but of course, the soil microbial activity needs to be ‘maintained’ and nutrients need to be ‘replenished’ to ensure future soil fertility.
- And to reach the highest level of productivity of cocoa trees the soil and nutrients should be ‘optimized’ for cocoa.

Note that whilst Soil fertility restoration, soil fertility maintenance, and soil fertility optimization are three approaches to ensure soil fertility to support high productivity of cocoa trees, the principles are the same: (i) the right choice for a crop with regards to soil structure, climate etc., (ii) managing pH to stay above 5.8, (iii) ensuring microbiological health and activity through organic matter, and (iv) ensuring availability of the right nutrients in the right balance by fertilizer (this is replenishment).

Note: it is important to stress that nutrient replenishment is not in itself the whole solution to soil fertility. The soil structure (argyle, sandy, rocky) and the position of the farm (slope, regular flooding) are important factors for the success of cocoa cultivation, whilst organic matter and a functional microbiological ecosystem are equally important for the root system of the tree to absorb the nutrients from the soil. Therefore, as it is difficult to change soil structure or position of the farm, CSP urges farmers to evaluate their soil structure and farm position for suitability of cocoa cultivation, whilst it is recommended that farmers support organic matter and soil health by leaving all organic matter such as pruning debris and healthy cocoa pod husks in the farm, preferably in ‘shallow trenches’ between the trees. Where needed, additional organic matter can be added through raw organic matter, compost or organic fertilizer.

Why the Initial Focus on Cocoa Nutrient Replenishment Fertilizer

A ‘cocoa nutrient replenishment fertilizer’ can be used to restore nutrient availability to an acceptable nutrient balance, and can maintain nutrient availability in soils that already have an acceptable level and balance of nutrients, whilst such fertilizer can be the basis of a ‘soil fertility optimizing package’ for farmers whom wish to optimize their soils for very high yield. Therefore a ‘complete nutrient replenishment fertilizer’ with all nutrients in the right ratio is an acceptable first step for farmers to manage nutrient availability in their soils better and reach yields of 2.5 mt/ha or more, whilst for higher yield targets, additional nutrients may be needed.



Nutrient Replenishment: the Needs of the Trees vs. What We Apply

It is important to note that trees do not absorb all nutrients that are applied to the soil or that are available in the soil. Depending on soil structure there can be leakage or seepage of nutrients to deeper soils where the roots of (cocoa) trees can't reach or there can be run-off through the rain of newly applied fertilizer. Additionally there are chemical reactions in the soil that tie up some nutrients and make them less available to the root system of the trees, and there are differences in nutrient solubility as well as ease of nutrient absorption by the root system. All this means that the nutrients in fertilizer must be adapted to these factors, and therefore the right ratio of nutrients in fertilizer may differ from the ratio of nutrients found in cocoa beans and pod husks.

The nutrient ratios in the table are the ratios of what we must apply, not what the tree needs. Therefore the ratio of P may seem high vs the contents of P in cocoa beans and pod husk, but P is not very soluble and isn't absorbed easily by root systems and therefore the volume of P in fertilizer must be increased to ensure enough of it can be absorbed by the tree. (CSP)



Foto: Armin Hari

Wahyu Wibowo, the Executive Director of CSP: A NEW SPIRIT FOR INDONESIAN SUSTAINABLE COCOA

AFTER a few months without a Director, the CSP Supervisory Board finally choose someone that is considered most capable for filling the position as the new Executive Director of CSP. After going through a lengthy selection process, Wahyu Wibowo is set as the new CSP leader.

As introduction, Editorial had a short Interview with Wahyu Wibowo to get a broad picture of his view towards the development of sustainable cocoa sector in Indonesia. This Interview is also addressed to get to know better with the new CSP Executive Director.

In your opinion, what are the challenges and what is the condition of the development of sustainable cocoa sector in Indonesia nowadays?

Looking at the condition of cocoa sector in Indonesia, there will always be challenges to be addressed. The condition now shows that the average age of cocoa trees in Indonesia is already classified as old, that significantly hinders productivity. Farmers certainly know better that the solid solution to this problem is farm rehabilitation, with farm rejuvenation or with replanting. However, the problem with Indonesian cocoa sector is that most of the farmers are smallholders, with little or no access to finance to enable them invest on farm rehabilitation. Not only access to finance, the availability of certified seedlings is another problem especially from the perspective of affordability at the farmer level.

In addition to that, soil degradation has been one of the main focuses in which the application of fertilizer

is seen as one of the best ways in replenishing the nutrient back to the soil. However, the next challenge is on the availability of fertilizer. Farmers have little or no access to fertilizer, even when there is access to it, the price is still a problem. The same problem with the access to subsidized fertilizer, to make the problem worse, government subsidized fertilizer is actually mainly aimed to be used for food crops, with no cocoa specific fertilizer available or affordable for the farmers.

The next challenge faced by the farmers is global climate change. The decrease on the environmental support and weather anomalies add a long list of challenges faced by farmers in the centers of cocoa production throughout Indonesia.

All above challenges have been the causes of production decrease and have

significantly influences the welfare of the smallholder farmers in Indonesia. With the decreased national production, national processing industry finds it difficult to maximizing installed production capacity and led to importing processed cocoa.

Beside the aging cocoa trees, the latest issue nowadays is the aging farmers. To make the matter worse, cocoa sector hasn't been able to attract young generation to take parts in increasing cocoa production and productivity.

These are the challenges that the cocoa sector is facing. We remain optimistic towards these challenges and change it into opportunities to improve production and productivity of cocoa in Indonesia.

What is your reason for joining Cocoa Sustainability Partnership?

Before joining Cocoa Sustainability Partnership, I was involved in many sustainability programs in Indonesia. I have quite long experience with those programs; in plantation industry, multi-national processing industry, and also both national and international institutions in Indonesia.

Before joining, I have also built a good rapport with some CSP members and stakeholders in the sustainable cocoa sector in Indonesia. I can see their commitment and efforts in improving farmers welfare through developing cocoa production and productivity sustainably.

With my long experience, good rapport with all stakeholders in cocoa sector, and the strong commitment from CSP members and all stakeholders, I then confidently decided to join this Public-private partnership organization.

How does your experience help CSP future development specifically, and the development of sustainable cocoa sector in Indonesia in general?

During my years of experience, I have witnessed the importance of equal relationship between government, stakeholders and partners, in developing an organization. And I have done that well.

CSP, in the future, should be strengthened on the function element that can held by secretariat. Therefore, the organization should be supported in running its function to absorb aspiration and provide information that is useful for its members. Besides that, CSP should also be able to foster collaboration with government and stakeholders on behalf of all its members to work together in developing sustainable cocoa sector in Indonesia.

How will you develop CSP and its members?

The focus attention to developing CSP with all the members is how the secretariat can be filled with capable staff with

competencies that support daily activities of CSP. To realize that competencies, CSP should support personal development of staff concerned.

As membership organization, CSP should be developed with holding firmly to existing beliefs and values. These values are very much important for CSP in order to be able to work optimally in accordance with the mandate and things that have been defined clearly in 2020 Roadmap.

What are your expectations and ideas on how CSP should play its roles?

As the only one organization that brings together stakeholders in the sustainable cocoa sector in Indonesia, CSP can play a significant role to channel all its members to relate directly with government, donor organizations, research agencies, university, big scale industry, small and medium industry, and cocoa farmer groups. CSP can play role in supporting Policy and implementation of initiatives of sustainable cocoa development in Indonesia by involving all the members and stakeholders. All kinds of efforts must be taken to ensure a more direct, integrated and coordinated development and at the same time preventing from the risk of overlapping. It is the shared expectation that all activities by CSP and all the members can present a real result in the form of increased productivity, farmer welfare, attracting younger generation to be involved in the sector and culture pattern that takes into account the social and environmental factors.

What are your expectations and ideas on how to develop sustainable cocoa sector in Indonesia in the future?

Developing sustainable cocoa sector in Indonesia is not an easy task to accomplish; therefore a massive cooperative effort must be in place where all stakeholders take parts to realize sustainable cocoa development. By coordinating all of the programs that CSP members and other stakeholders are doing, we can comprehensively improve productivity.

The common case is, when a program period is due, the tendency is for the productivity efforts to stop as well, regardless the achievement. A program that has improved productivity to 1 ton per hectare, upon the completion of the program, farmers production drops back to 600 or 700 kg. We want to avoid this from happening again.

Stakeholders should be transparently coordinating, focusing on the main problems, distributing tasks, and to be neutral and not taking sides. When this kind of atmosphere is created, then the cocoa development target will be achieved. In the future, National cocoa roadmap 2015-2045 has been issued by the Director of perennial, refreshment and annual plants, ministry of Agriculture. We can synergize our CSP roadmap with the national Roadmap to create a better coordination on the development of sustainable cocoa sector in Indonesia. (CSP/AH)



Agung Widiastuti
Director of Kalimajari Foundation

The Spirit and Appreciation of Cocoa Farmers in Jembrana Regency

It is unpredictable as before. The words are not able in representing the thankful appreciation and pride of the members of *subak* who have been participating in Sustainable Cocoa Program. The dream which is accompanied with hardworking spirit within six years can be achieved. The important event on October 30, 2014, was a proved milestone of togetherness, spirit, and hard work of the cocoa farmers for the achievement in the first exporting activity of sustainable cocoa bean to Valrhona, France. Unbelievably, this first export was performed by Kerta Semaya Samaniya Cooperatives (KSS), Jembrana Regency, Bali. The data shows that until 2017, it had been four times shipment to Valrhona with

annual average volume of export was 12,5 tonnes. And the exported cacao beans were the fermented ones!

This process is the achievement of all facilitation activities from upstream to downstream approaches in Jembrana Regency, Bali, for the sustainable cocoa commodity. “*Cocoa is my life.*” As I Ketut Wiadnyana expresses his commitment. He also the leader of Kelihan Subak Sekar Wangi Cooperatives, Yeh Embang Kauh Village, Jembrana Regency, Bali. This expression is the appreciation and hope of hundreds of cocoa farmers in this district who had grown their hopes that this commodity will be sustain in their area. “*This is the hope and meaning of “lestari” (sustainable) in cocoa sector. In simple words, how this commodity will be existed through times, and will always be the part of daily livelihood of the*



Foto: Yayasan Kalimajari

people in Jembrana." He continues. The cocoa commodity in this area is a potential legacy to the next generation which will not be vanished from time to time. And the registered numbers of *subak abian* members (farmers group) are 609 cocoa farmers and they are grouped into 38 *subak abian*.

The appreciations and hopes of the cocoa farmers

The appreciation and expectation of the cocoa farmers is also the inspiration for Kalimajari Foundation to conduct advocacy to cocoa farmers, *subak abian*, UPH, and Kerta Semaya Samaniya Cooperative. With all efforts and resources, the Kalimajari Foundation runs advocacy program within the time period where achievements can be realized through struggle and hard work with the support of the parties.

The expectation is not an exaggeration provided with the potential in this district. Cocoa and Jembrana are two things that are strongly intertwined. Cocoa commodity has provided the main support in the livelihood of the people of Jembrana Regency. The fulfillment of food for the community, better access to education and health, and decent housing have been a testament to the contribution of this commodity. Although, nationally, Jembrana Regency is not included as 10 major cocoa producing areas in Indonesia, but the dynamics and efforts that have been pursued to achieve sustainable cocoa development should be of concern.

Cocoa Today: Challenges and Sustainable Cocoa Motivation
Indonesia's cocoa production is highly dependent on global export market conditions. And our cocoa industry must adapt to all the developments taking place in the international world. Not only that, since the increase in consumer awareness, it has influenced the agricultural commodity market significantly. Consumers not only prioritize the quality of the products they buy, but also pay more attention to the issue of product sustainability for economic, social, and environmental aspects.

These conditions then have an effect on the involvement of producers in any cocoa sector development program that is directed to sustainable conditions. But reality shows different things. Only a small proportion of Indonesian cocoa sector products have been certified. But that does not mean that

there is no hope for Indonesia to penetrate the market of sustainable cocoa commodities.

It is on this basis that the Sustainable Cocoa Program, or Kakao Lestari, is raised in the certification framework. This effort is an initiative to complement and refine the sustainable cocoa development programs that have been implemented so far, whether programs are initiated by the government, the private sector, or other parties.

Since 2011, Kalimajari Foundation with Kerta Semaya Samaniya Cooperative and UTZ Certification have begun implementing an advocacy process to cocoa farmers in Jembrana Regency. Support from various parties was also successfully collected by the Kalimajari Foundation to support the sustainable cocoa development programs. For example from local, and national government, Indonesia Eximbank, TUV

NORD Germany, OXFAM NOVIB, Bank Indonesia, Agriterra, LWR, Rabobank Foundation, and so forth. With this support, 582 farmers spread across 35 *subak abian* in four districts began to apply the spirit to build cocoa commodities through the guarantee system, or certification process. Upstream and downstream aspects become the main concentration of advocacy program implemented.

In addition to strengthening at the farmer level, social institutions of *subak abian*, and cooperative as certificate holder also received capacity building process. With the hope that it is able to present the nuances of learning, especially the process of empowerment that is more real and strong. The development program itself is finally able to deliver the position of Kerta Semaya Samaniya Cooperative as the first program in Indonesia that puts a farming community institution in the

form of cooperative as UTZ certificate holder. This achievement of course is not without a struggle and challenges. It went through a long process with all the limitations and dynamics along the way. Limited human and financial resources, building ICS as a team and system, and capacity-building at the farm level (P) and at the cooperative level (C) is a series of challenges faced during the advocacy program implementation.

However, the enthusiasm and ambition of the farmers became a torch that still illuminated the implementation of the program. Efforts to improve the quantity and quality of cocoa beans, empowerment of groups/*subak abian*, the development of joint sales system, and the hope of increasing the income of farmers for the benefits received in the form of premium price, become the motivation for the farmers in implementing the sustainable cocoa program



Foto: Yayasan Kalimajari



Foto: Yayasan Kalimajari

in Jembrana, Bali. Another important aspect is the fundamental philosophy of sustainability within the framework of certification. This meaning becomes the media of awareness movement of important value for this commodity to keep growing and developing sustainably in Jembrana Regency.

Benefits Provided and the Spirit of Change

During the period of advocacy process carried out in the cocoa farming community, dynamics have become day to day things. The greatest challenge was at the beginning of program implementation in how to change the mind-set of farmers gradually and move forward. Over the course of the same period, the process of intensive facilitation and communication between farmers with various parties such as government, private sector, donor agencies, etc.,

in turns have shown positive impacts felt by the farmers. Another important point is that the cooperative is bigger and getting stronger.

This advocacy process provides several benefits for farmers. The most significant and visible change is the increase in farm productivity in terms of the quantity that is the direct impact of the implementation of the Good Agricultural Practices (GAP). From the data of successful developments recorded, the average increase in production per tree is between 1.8 - 2 kilograms of wet beans which previously only reached 1 - 1.5 kilograms per tree. And not only that, the spirit of farmers to improve the post-harvest process is also grown with the support of various parties.

Not only the benefits for farmers, *subak abian* also get strengthened institutional capacity in marketing

aspect. In the implementation of the program, it has been built and mutually agreed that the marketing mechanism is carried out directly from farmers to cooperatives, and processing is done in the Processing Unit (UPH) in each *subak abian*. With such systems and mechanisms, the developed market chain will become simpler, so that farmers, or *subak abian*, can access higher prices. Sales are also conducted collectively under the coordination of *subak abian*. The perceived benefit is that the farmers' bargaining position against prevailing prices is becoming stronger.

Another benefit is that the quality control process is done in stages. Starting from farmers, *subak abian*, UPH, and cooperatives. UPH has been able to provide good benefits for its farmer member. The UPH itself is built with high self-reliance, and is not project-oriented but rests on a sustainability spirit that has been well realized.



Kerta Semaya Samaniya Cooperative as the certificate holder also benefited from the advocacy process by Kalimajari Foundation. Improving the governance of cooperatives is done in stages, well planned, and has been arranged in the agenda of the program prepared with members of the cooperative. In addition, compliance with standards laid down in the Code of Conduct (COC) UTZ Certified from year to year has become a factor in increasing the role of cooperatives in the framework of the certification program. Our UTZ certification is not only placed as "Label" but as a movement from year to year, because it is not only about the fulfillment of the control point but rather on how the change can be controlled, recorded and perceived by the farmers and cooperative.

Cooperative bargaining positions on prices and market choice become increasingly strong. Cooperative does not depend anymore with just one market. The process on market selection is based on which provides the best reward to farmers. Kerta Semaya Samaniya Cooperative is also now able to become a reference for the purpose of comprehensive study from various regions in Indonesia, which certainly able to provide the spirit to improve the management system a sustainable manner.

The latest achievement by the Cooperative of Kerta Semaya Samaniya (KSS) is selected as the top 50 globally in Cocoa Excellent 2017, selected from 166 samples of 44 countries. The samples are sent in the name of I Made Sugandi and fully facilitated by KSS and ICCRI. The achievement has become a fermentation spirit that must be strengthened from year to year. Another performance achievement that has been shown is the success in collaborating with various buyers. One such form of cooperation is the concept of a good partnership with Valrhona, France and also a new buyer from Japan. Since 2015, KSS has established marketing co-operation and has sent two containers with volume per container is 12.5 tons. The cooperation has also benefited both parties and strived to be able to run sustainably.

Challenges Faced

During the advocacy process, the biggest challenge faced is how to build commitment from all parties involved. The commitment built is not only from farmers, but also government, legislature, private sector, buyer/market, and others to support continuously. Farmers' commitment is not a single success factor, but how all parties can play a maximum role. And this is what continues to be pursued given the impor-

tance of building the commitment. Especially considering that facilitating a large number of farmers, 609 peasants, requires support, commitment and coordination.

To foster support from all parties, Kalimajari is also intensively conducting dialogue on synergy and advocacy with local, provincial and national government. Similarly with the advocacy to the buyer, especially market niche. It is well known that the next generation crisis in cocoa commodities is very imminent. The thrust in youth program is part of the current struggle. Providing a good business understanding, building a more sustainable market and encouraging the spirit of farm improvement as a saving center are some of the targets we build through the approach of young farmers. Currently, almost 80% of IMS in each *subak abian* are young farmers who want to go back and care about agriculture. This process we built together in the spirit of UTZ SP (Strategic Partnership) SUBAK Program (Sustainable and Advocacy in Kakao) in Jembrana, to be upscale into the national scope.

Another challenge faced is from the institutional side. The process of empowerment of *subak abian* from its initial function as a religious social institution becomes a process of productive economic empowerment is a challenge in itself. The effort of social transformation must then be done gradually and not contradict with the noble values that have been built in *subak* system. The communication system and the institutional bond of *subak* can be utilized to be an effective communication medium in running this program. The *Paruman* System (routine meeting) of each *subak* has improvised as a medium to communicate the sustainable cocoa certification program effectively.

Building trust and togetherness with Kerta Semaya Samaniya Cooperative is also a challenge in itself. Since its establishment in 2006, the cooperative was shut down in 2010. And then, the Kalimajari Foundation came with a spirit of sustainability. Slowly and planned, the commitment to rebuild and empower this cooperative starts to take shape. Not easy of course, it was somewhat very difficult, especially in collecting and pulling back the trust from farmers with the new transparent management system run by people with capacity. "This is the challenge. The Kalimajari Foundation together with various parties encourages the growth of a strong institution. And from only 11 *subak abian* in 2011, now has grown to 38 *subak abian*. And all are members of the cooperative." Said Agung Widiastuti, Director of the Kalimajari Foundation.

The Process towards Improvement and Useful Learning

A seemingly never ending process of improvement and refinement is still pursued collaboratively. Aspects from upstream to downstream that have been built constantly becomes evaluation of improvement. The learning outcomes that have been collected during the program are distributed to the farmers as much as possible to find more and more pio-

neering leaders who will serve as agents of change to other farmers. It takes facilitator's innovation, improvisation, and creativity in translating the basic principles of Code Of Conduct from UTZ Certified, USDA Organic and EU into a more simple language so that it can be accepted and implemented by the farmers. One way of approach done is to change the term COC into *uger-uger* which means "the rules" in the Balinese language. Another innovative way is to translate the guidance document into Balinese so it can be easier to understand. The main hope is that it is easier to implement and serve as a reference.

Cooperatives with all its positive and negative values in Indonesia should be empowered as community-owned institutions. In the context of sustainable cocoa certification programs cooperatives must be supported, strengthened and developed in order to able to provide the best benefits to its members for any changes, fixture, and struggle that have been done by farmers. All the dynamics that have been built by farmers in Jembrana along with Kerta Semaya Samaniya Cooperative and Kalimajari Foundation as facilitator as well as intensive supports from other parties, have proved that farmers can comply with the sustainable certification process with the spirit of change, independence, and unity. Kalimajari Foundation realized that the process was not easy, but within six years of process together with the stakeholders, especially the farmers, it can be proven that success can be achieved through intensive facilitation, and the changes will be shown towards the better. And the very important thing to underline in this process is that during those six years, it has been proven that small-scale cocoa farmers have the ability to show remarkable success.

All this process is also a form of struggle, commitment, and consistency of the Kalimajari Foundation as a local institution in Bali that wants to show the public that "the Island of God" also has the potential of local commodity to be proud of. "Once again this is not just a matter of selling and buying and also not a matter of a piece of bean but more about the struggle to raise the red and white flags and the eagles on my chest. About the quality of cocoa that can compete in the global arena through the implementation of fermentation values. May the Kalimajari Foundation be able to hold this mandate along with cocoa fighters in Jembrana, and in Indonesia in general." Said Agung Widiastuti closing the statement. (YK/AW)



CSP General Assembly Meeting: EXPLORING NEW AVENUES

ONE of the task forces which is established by Cocoa Sustainability Partnership (CSP) is National Cocoa Curriculum Task Force. This task force is mandated to compile a national document in form of National Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest in order to make it available and used by public, especially it can be utilized by agricultural extension providers, such as government, private, and independent extension staffs.

The General Assembly Meeting of Cocoa Sustainability Partnership in December 2017 was relatively different with previous meetings. At that time, the position of Executive Director had not been filled with appropriate person, and the Chairperson of General Assembly which was held by Jeremy Hicks of Bridgewater should be reelected in the end of 2017. As well as the position of Chairperson and Treasurer of Supervisory Board. But with some considerations, the members of CSP and other stakeholders in Indonesian sustainable cocoa sector declared that the Chairperson and Treasurer of Supervisory Board, and the Chairperson of General Assembly must prolonged their leadership periods until the position of CSP Executive Director was selected. And it was continued until March 2018.

The activities planning of Cocoa Sustainability Partnership, furthermore, for 2018 also must wait the results of CSP Roadmap 2020 reviews which was still being implemented until March 2018. And the participation of members and significant stakeholders in sustainable cocoa sector were highly demanded to be involved for the review of roadmap on Indonesian sustainable cocoa development. Moreover, there were some activities that must be implemented until early of 2018, i.e. the finalization of National Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest, the National Working Competency Standards (SK-KNI) for Sustainable Cocoa Sector, and facilitation of Regional Cocoa Forum.

During this General Assembly Meeting, CSP presented resource persons to share their learnings, experience, and knowledges. They were the researcher team of Sydney University, and representatives of PT. Pupuk Kaltim and Saprotan Utama. As for the presentation of PT. Pupuk Kaltim and Saprotan Utama, it was expected that it would be referred as reference for CSP members in deciding which fertilizer specification was available and affordable to be applied by cocoa farmers in their fields. The Center for Agricultural Training, Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture



Foto: Armin Hari

(BPPSDMP), Ministry of Agriculture also explained about the progress of collaboration among CSP and its members with the national government in compiling the National Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest. *"The challenges of CSP for this current period is about the emptiness of Executive Director position that will impact the additional time of duties and responsibilities holders for Supervisory Board and General Assembly that should be ended in December 2017. But for the temporary, the time of position will be prolonged till the position is fitted with new one."* As explained by Imam Suharto, the Chairperson of Cocoa Sustainability Partnership Supervisory Board, to the members and attending stakeholders representatives.

Jeremy Hicks as the Chairperson of CSP General Assembly also explained that the theme of this meeting was the solution that could be risen as the answers of experienced problems for the various stakeholders in sustainable cocoa sector, especially the cocoa farmers, in gaining access toward fertilizer and cocoa planting materials. *"In order to provide description of cocoa specific fertilizer which is developed from recommendation on Fertilizer Nutrient Ratio for Nutrient Replenishment, there will be two different pre-*

sentations from the representatives of fertilizer companies, i.e. PT. Pupuk Kaltim and Saprotan Utama. From the presentations, it is expected that CSP members and other stakeholders can gain alternative solution on the appropriation and fulfillment of cocoa specific fertilizers.” Said Jeremy Hicks.

As for the arrangement processes of National Curriculum and Training Module for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest, Ir. Lia Ratna Ernalia W., as the Head of Enforcement, Institutional, and Workforce Training Unit, BPPSDMP, Ministry of Agriculture, delivered her presentation on the arrangement processes of this curriculum and training module which was based on the SKKNI for Sustainable Cocoa Sector. “*There are seven points that should be mentioned in term of institutional training, and one of the points is stabilization of competency based institution as the basis of arrangement processes of this curriculum and training module. And this activity has been implemented in joint cooperation among Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture (BPPSDMP), and CSP.*” Ir. Lia Ratna Ernalia W. explained. She also described that the writers team of this curriculum had met the criteria of representatives from various elements, also the participation of Balai Pusat Pelatihan Pertanian Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jawa Timur.

In accordance with this issue, Suharman Sumpala of Swisscontact as representative of National Cocoa Curriculum Task Force portrayed that the mandate of this task force was to compile a national cocoa curriculum as manual and training module to be presented and used by public. This curriculum also specifically could be applied by agricultural extension service providers, such as government, private, and independent extension staffs in providing facilitation and assistance to the cocoa farmers in the field. “*The main duty of the task force and writers team is to harmonize the current available and applied manuals by CSP members, government, researchers, and farmers, and can be referred as reference in developing training modules for sustainable cocoa cultivation.*” Suharman Sumpala described. This national document would be launched officially in February 2018

Regarding the review of CSP Roadmap 2020, Ross Jaax of Swisscontact presented that the background of this activity was based on the objective to gain better insights on how CSP and its members performed their efforts in achieving the target of this roadmap since the initiation in 2013, and the details of how to create the efforts in achieving the target

realization. Moreover, the roadmap review activity was also aimed to formulate the improvement recommendations to the relevant roadmap and how the efforts in continuing the implementations.

During the implementation, the roadmap review activity was focused on four main questions, i.e. how far the achievement of the roadmap towards 2020 and how relevant the roadmap to the developing cocoa sectors; how the CSP Secretariat Office implemented its role and function in assisting the facilitation of roadmap implementation; the potential of improvement and improving the implementations in achieving the targets; and how to measure the systemic changes of CSP on the development of Indonesian cocoa sector. “*Through independent consultant who are implementing the review, CSP is expecting the participation of its members and significant stakeholders in providing inputs and comments for the available roadmap.*” As Ross Jaax explained the processes of implementation for the CSP Roadmap 2020 review.

In the next session, David Guest of Sydney University who supervised a researchers team of Sydney University, Australia, and Hasanuddin Univeristy, Makassar, presented the research issues on the sustainability and profitability of cocoa-based agricultural system in Indonesia. From his presentation, it was showed that the objectives of the research were to gain understanding of problems in relation to production, farmers productivity, and cocoa profitability; to identify the opportunity for intensification, diversification, and cocoa entrepreneurship; and to gain understanding on farmers health condition in accordance to productivity. It was further delivered that the core obstacle of farmers was the lack of financial capacity and it impacted the ability in adopting better agricultural technology. The aging cocoa farmers was also another identifying factors. “*Based on the available data, there are approximately 53% of farmers in Indonesia with bad healthy condition.*” As David Guest presented. One of the strategies in improving the cocoa production could be implemented through the improvement of farmers health condition. This health condition should not only be focused on the farmers, but also to the farmers families members.

(CSP/AH)



Foto: Armin Hari



Foto: Armin Hari

THE LAUNCHING CEREMONY OF NATIONAL CURRICULUM AND TRAINING MODULES FOR SUSTAINABLE COCOA CULTIVATION

AS one of the performance achievement of the Cocoa Sustainability Partnership (CSP) members by establishing collaboration with the national government, the National Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest can be presented to the public this year. Latterly, the facilitation and assistance processes to the smallholders cocoa farmers will be conducted by the extension services providers. *"This national curriculum and training modules is one of our efforts as CSP members in enabling the cocoa farmers to double their productivity and improving the quality in sustainable ways. It is also performed in order to construct the Indonesian cocoa sector to be globally competitive, economically viable, and environmental and socially sustainable."* Wahyu Wibowo, Executive Director of CSP delivers his welcoming remarks during this national document launching. It is also added that CSP is an organization that accommodates all cocoa stakeholders by establishing coordination and collaboration by fostering trusts, commitments, communications, and transparency for the empower-

ment of cocoa farmers and its institutions.

In the presentation of Head of the Center for Agricultural Training (Puslatan), Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture (BPPSDMP), Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, which is represented by Ir. Lia Ratna Ernalia W. exposes that the objectives of this national curriculum and training modules arrangement are the preparation of professional and competitive agricultural human resources, the availability of a document that can be applied by publics, particularly agricultural extension staffs both of private and independent extension staffs.

The arrangement processes, delivered in 2017, were the fruitful result of collaborations and cooperation among Cocoa Sustainability Partnership with two significant institutions in Indonesia, i.e. Center for Agricultural Training (Puslatan), Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture (BPPSDMP), Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, and the Indonesian Coffee and Cocoa

PELUNCURAN KURIKULUM NASIONAL dan MANUAL BUDI DAYA BERKELANJUTAN (GAP) DAN PASCA PANEN (POST HARVEST) KAKAO

Oleh :
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENNGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. ... 09 Februari 2018

Foto: Armin Hari



Research Institute. The compiling and arrangement processes of this document is also coordinated with the implementation processes of the National Working Competency Standard (SKKNI) for Sustainable Cocoa.

In the similar occasion, Ir. Lia Ratna Ermalia W., as the Head of Enforcement, Institutional, and Workforce Training Unit, also delivers that the launching of national curriculum and training modules is conducted as the form of socialization to the cocoa stakeholders that the National Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest is already available and referred as the guidelines in providing training and

empowerment of cocoa farmers in Indonesia. *“The implementation of this national curriculum and training modules is the guidelines to train the agricultural extension staffs (government, private, and independent extension staffs) will be implemented by each government institution and other cocoa stakeholders that applicable with the current needs in the field.”* As Ir. Lia Ratna Ermalia W. explains how the document will be applied.

Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc., on behalf of the Head of Center for Counseling and Human Resources Development of Agriculture (BPPSDMP) explains that the main objective of this national curriculum and training modules is that

the training implementation for the cocoa farmers can be conducted in standards wherever the training is applied. Regarding that, the scheme of structuralized human resource development must be afforded and designed in order to gain the target of cocoa commodity productions. *“In term of empowerment, the government and private sectors are highly expected to be able in establishing coordination and synergies, therefore the benefits of agricultural human resources improvement can reach wider scopes. And the result of these efforts is how we work together in improving the farmers’ welfare through improving the cocoa productions.”* As mentioned by Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc..



The supports of BPPSDMP in term of cocoa technical training facilitation can be also cooperated with the Training Unit, both of national and provincial technical implementer units. If the assessors, competency test venue, and sets of other competency tests are in place, the profession certification can be implemented. *“Through integrated extension and facilitation, it is expected that the synergies of farmers’ skill in cocoa cultivation and management can be created. And the improvement of qualified production also can be achieved in all cocoa production centers, and competitively in various stages of markets.”* Said the Head of the Center of Agricultural Training.

“We, as the cocoa stakeholders in Indonesia, are not quitting in working to grow and develop this sector. One of our economy sources in crops sector is cocoa.” Ir. Musdhalifah Machmud, MT. as Deputy of Food and Agriculture Affairs, Coordinating Ministry of Economic Affairs expresses her speech during the launching ceremony of National Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest at Graha Sawala Building, Coordinating Ministry of Economic Affairs, on Friday, February 09, 2018. It is also added that for the fulfillment and securing the food sector, the only contributor is on food crop. But in developing the economy, the crop sector is the biggest support.

It is also clearly mentioned that the main objective of this national curriculum and training module for cocoa sector is how we can work together in establishing coordination and synergy in improving the livelihood of cocoa farmers who are dominantly smallholders farmers. And one of the efforts in increasing their welfare is through the improvement of their cocoa productivity. It is also expected that this national curriculum and training modules can generates new spirit to the cocoa farmers in Indonesia, and in order to empower them as professional farmers by fulfilling and mastering the implementation of the modules in this document. *“Furthermore, the extension services to the farmers must be revitalized.”*

Foto: Amin Hari



The extension services are one of the significant elements in developing the economic in the agriculture and crop plantation areas. The farmers are highly needed proofs as examples in cultivating their crops.” Said Ir. Musdhalifah Machmud, MT. who is also the Chairwoman of Advisory Board of Cocoa Sustainability Partnership.

Musdhalifah also asks the participation of all cocoa stakeholders in the region to join and work together with

Cocoa Sustainability Partnership. It is said that CSP is one of platform to collectively works, contribute the ideas, plan, and implement the action in supporting the improvement of crop sectors, particularly cocoa, in Indonesia.

(CSP/AH)

Foto: Armin Hari



CSP VISITS ICCRI IN JEMBER, EAST JAVA

AS one of duties for the new Executive Director of Cocoa Sustainability Partnership is visiting CSP members and key stakeholders in Indonesian sustainable cocoa sector. In the early of 2018, the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI) is the first destination during the series of visits. During the meeting, it is participated by Dr. Ir. Misnawi as the Director of ICCRI, Dr. Agung Wahyu Susilo, SP., MP., as Head of Cocoa Research Bureau, and Dr. Ir. Soetanto Abdoellah, SU., as Chairman of Indonesian Cocoa Board (*Dewan Kaka Indonesia/Dekaindo*).

In this occasion, aside of introductory session, some important agendas are discussed, such as the coordination of activities in the upcoming months among CSP, ICCRI, and Dekaindo, and sharing the idea on how to accelerate cocoa sustainability in Indonesia and global level.

“One of significant events of CSP with its members in the near future is the launching of National Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest, and finalization process of National Working Competency Standard (Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia /SKKNI) for Sustainable Cocoa, the follow-up plan of cocoa planting material workshop, and review activities of CSP road map.” As Wahyu Wibowo, Ex-

ecutive Director of CSP, explains to the audiences. *“Regarding the important values of these activities, it is a great moment for CSP in establishing coordination with the stakeholders in Indonesian sustainable cocoa sector.”*

In the similar occasion, ICCRI also delivers that at this moment, ICCRI has been created an innovative package of qualified and certified cocoa planting materials and farming mechanization in improving the cocoa productivity. *“For more details on this package, it will be announced and launched shortly. The expectation is that the farmers can increase their income and livelihood by improving their cocoa production,”* Dr. Ir. Misnawi said. Furthermore, ICCRI also expresses their intention to establish closer cooperation with CSP in the future, such as the plan of ICCRI in assigning its experts to the cocoa production center areas in order to provide technical assistance to the cocoa farmers. And this activity can be facilitated by CSP and its members.

In accordance with the development of National Curriculum and Training Modules for Sustainable Cocoa Cultivation and Post-Harvest, ICCRI puts interests to CSP and its members to be able in engaging coordination with the Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, in empowering and strengthening the field extension

staffs. This initiative can be also participated by the Regional Cocoa Forum in the cocoa production center areas in Indonesia.

Similarly, the Indonesia Cocoa Board (Dekaindo) also discusses about the common interest of all stakeholders in cocoa sector, i.e. interest of youth on cocoa business. *“Hand in hand, CSP and cocoa stakeholders, including Dekaindo, must initiate the approaches in how to engage youths into sustainable cocoa sector and cocoa business. And it is the responsibilities for all stakeholders in cocoa sector.”* Dr. Ir. Soetanto Abdoellah, SU., as the Chairman of Indonesian Cocoa Board (Dekaindo) expresses the interests of all stakeholders in Indonesian sustainable cocoa sector.

Dekaindo also invites CSP and its members to participate in meeting and discussion processes with the International Cocoa Organization (ICCO) on January 22, 2018, in Jakarta. In the upcoming meeting, there are a lot of certain issues to be discussed by the stakeholders in cocoa sector and CSP with its members are invited to contribute their valuable ideas for the advance of Indonesian sustainability cocoa development and the efforts to improve the farmers' income by increasing their cocoa productivity. (CSP/AH)



Foto: Armin Hari

INTRODUCTION OF EXECUTIVE DIRECTOR AND ELECTION OF SUPERVISORY BOARD CHAIRPERSON OF COCOA SUSTAINABILITY PARTNERSHIP

IN the beginning of this year, Cocoa Sustainability Partnership (CSP) conducts extra ordinary meeting of all Supervisory Board members. This first meeting is conducted in Makassar with the main agendas are to introduce Wahyu Wibowo as new Executive Director of CSP, and the election process of chairperson and treasurer of Supervisory Board for period of 2018.

In his description, the Executive Director of CSP expresses that in running the new duty in cocoa sustainability partnership of Indonesia, it needs full support from the members of Supervisory Board, CSP members, and all cocoa stakeholders in coordinating the initiatives of CSP in the future. *“The new Executive Director of CSP is our brandy-new hope of cocoa sustainability in directing the CSP to the better future that the organization can acquire more spaces in the national and global level.”* Imam Suharto as the chairperson of Supervisory Board for 2017 delivers his notes during this introductory session.

The position of Cocoa Sustainability Partnership, furthermore, is also highly expected in affording the significant roles. Such as the efforts in establishing a strong partnership with the government, particularly the coordination and alignment of activities with the policies of national government. Especially for the issues in relation to the policy and

regulation on cocoa sustainability.

Another expectation from this meeting that CSP must expands its influence and strengthens its network to the local and regional level, and establishes the coordination with other association and platform outside of Indonesia. It is important to be performed in order to be able in creating collaboration opportunities and in gaining the insights from neighbour countries on how they manage and develop their cocoa production. Moreover, it is outlined that the effectiveness of CSP Executive Office must be a strong asset in delivering the voices of farmers as wider and stronger influences in the local and national level.

“In the future, CSP should create effective and initiative activities to achieve the goals in cocoa sustainability road map. The organization must acquires strong relational aspects in actively engaging the members. CSP also should maintain cocoa sustainability to be more organize and dynamic and to be example to others platform models.” As Wahyu Wibowo, Executive Director of CSP, expresses.

Aside of the introduction of CSP Executive Director, this Supervisory Board meeting also perform the succession process of new chairperson and treasurer of the board for 2018 period.

The election process is limited to the members of Supervisory Board, and conducted in direct voting system. As for the candidates of chairperson, Ross Jaax of Swisscontact, and Chandra Panjiwibowo of UTZ/RA are selected. And for the treasurer position, there is only one candidate, Ani Setyoningrum of Barry Callebaut.

For the participating board members in the meeting, they directly vote their selection. But for the absence members, the voting system is by sending their vote through short messages to the former board chairperson.

After the voting processes, it is announced that the chairperson of Supervisory Board of Cocoa Sustainability Partnership for 2018 period is Chandra Panjiwibowo from UTZ/RA, and the treasurer of the board is Ani Setyoningrum of Barry Callebaut.

As symbol of board succession, Imam Suharto as the chairperson of Supervisory Board for 2017 period, hands over the important documents to the newly elected chairperson and treasurer and witnessed by the members of board. (CSP/AH)

IN accordance to the target of Cocoa Sustainability Partnership (CSP) and its members in increasing the productivity of cocoa crop in Indonesia, the organization conducts official visit to the Directorate General of Estate Crop, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, in discussing how the current development plan for the Indonesian cocoa sector. The meeting, furthermore, also discuss how the follow-up action of the implementation of government's programs in this sector for this ongoing and upcoming years. The Cocoa Sustainability Partnership, represented by Chandra Panjiwibowo as Chairman of CSP Supervisory Board, and Wahyu Wibowo as Executive Director of CSP, is honored by Ir. Bambang, MM., the Directorate General of Estate Crop, and accompanied by Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc., Director of Perennial and Beverage Crops, and Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc., as the Head of Sub Directorate of Beverage Crops.

During the meeting, Ir. Bambang, MM. is stressing his supports and appreciation to CSP and its members for the efforts that had been coordinated with the government in providing benefits, particularly the improvement of cocoa farmers' welfare. *"It is my gratitude to CSP who had provided supports in strengthening the cocoa sector in Indonesia. This sector must be the responsibility of all stakeholders to allocate supports, to the farmers and private sectors, in order to establish the sustainable cocoa. If we don't work together, hand in hand, the cocoa sector will be threatened."* The Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia said.

The cocoa sector, moreover, is the cultural crops and had been integrated into farmers' livelihood. If the farmers community doesn't provide much attention and for being confused in deciding what should to be done, the cocoa crops will be abandoned. If this crop is well maintained and cultivated, the cocoa crop is promising. *"In order to increase the cocoa productivity as expected, the commitments of all stakeholders are highly needed. The first thing that should be done is how*



Foto: Armin Hari

Meeting with the Director General of Estate Crops, Ministry of Agriculture: WORKING TOGETHER IN ESTABLISHING SUSTAINABLE COCOA SECTOR IN INDONESIA

we can work together in optimizing the natural resources which have not managed maximally." As Ir. Bambang, M.M. mentions. The Indonesian cocoa sector is approximately 100% cultivated by smallholder farmers with all their limitation. Regarding this issue, all stakeholders who have interest on the development of sustainable cocoa are responsible to provide attention for this sector. The government is acting like a commandant in allocating facilitation, and it is supported by all stakeholders, such as private sectors, banking institutions, and business scopes. And the farmers itself must be motivated and facilitated in implementing those hard works.

In his directional discussion, the Directorate General of Estate Crops is also delivering his interests that the stakeholders in cocoa sector must be cooperated together in developing the improvement of smallholders cocoa farming at certain areas. The local government also should be engaged with other stakeholders. *"The locomotive of cocoa sector development is the key activity of Directorate General of Estate Crops. The expected follow-up action is that each stakeholder in this sector should establish coordination with national government. Thus, each stakeholder can initiate and implement*

their activities harmonically with the government policy and program." Ir. Bambang, M.M. says. The programs of other stakeholders are also can be implemented along with the government program. And CSP with its members can fulfill the gap of government program, particularly in empowering and strengthening the cocoa farmers in the production centers areas.

The Director General of Estate Crops also realizes that it is very difficult in ensuring the parties that developing the crop sector is significant way. The national contribution of crop sector is relatively high. In 2017, there is approximately 429 billion rupiah contribution of 15 crop sector commodities to the Gross Domestic Product. *"This contribution is generated from the improper maintained yet of smallholder farming. The productivity rates are still far away from what we had expected, and it is possible to be developed in maximum way. But, it is still difficult to convince other parties in engaging them to provide much attention in developing the crop sector as commitment."* He says.

In responding this issue, the Executive Director of Cocoa Sustainability Partnership expresses that the results of this meeting will be developed and distributed to the members of CSP.

The private sectors to the regional cocoa forums will be informed to be able in establishing collaboration with the government programs. "The point is that the commitment must be implemented. Thus, the scattered activities will be coordinated. CSP also has high commitment in how the organization can provide supports and actively engaged with the Directorate General of Estate Crops and Ministry of Agriculture through series of activities such as the support of arrangement processes of national curriculum and training modules for cacao, the finalization of nutrients replenishment fertilizer for cocoa, and ensuring how the cocoa farmers can have accesses to the certified and qualified planting materials." As clearly explained by Wahyu Wibowo.

Chandra Panjiwibowo as the Chairman of CSP Supervisory Board also delivers that the objective of CSP establishment is that there is a fact that each cocoa stakeholder is working by its own, not in a coordinated term, and the results are not proper. Thus, a partnership in CSP is highly needed. "The established partnership, with Ministry of Agriculture, and Coordinating Ministry for Economic Affairs in board, is expected to move together. For the time being, CSP also conducts evaluation on its current structure. In the CSP structure, there is Advisory Board, Supervisory Board, and the participation of industries and trading sectors as members. Does this representative can coordinate the efforts? In the future, the synergy of government programs and policy, particularly these two ministries, industries, and tradings must be improved and they should be coordinated into form of routine meetings with the participation of all stakeholders in order to identify the activities that should be implemented, which stakeholders are able in fulfilling the needs, and how to implement them in the field." As Chandra Panjiwibowo explains.

Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc., the Director of Perennial and Beverage Crops, and Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc. as Head of Sub Directorate of Beverage Crops, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, also express the attention to the data problems in Indonesia. The coordination meeting with ICCO as global cocoa organization portrayed the result difference of data collection methodologies that had been implemented. "Their data shows that our production is decreasing, only 290.000 tonnes of 410.000 tonnes in 2013. This is the result of their methodology. But we are also developing our methodology. And I think it can be supported by CSP through regional cocoa forums." Said by Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc.. The data collection activity can be coordinated with the function of regional cocoa forums in some areas of Indonesia. Through these forums, the questionnaires and filling form will be distributed to the cocoa farmers in order to record their productivity in certain time period. It is expected that the facilitation activities also can be implemented simultaneously, and the data collection will be more accurate. The Directorate General of Estate Crops also has its own documentation design, and CSP can provide supports with its wide networks in Indonesia.

"We are working with Bogor Agriculture Institute now for the methodology, and we will create a model which is generated from three years observation periodically. Then the result can be utilized in creating statistics to forecast the amount of production for certain period in the future." The Director of Perennials and Beverage Crops says.

In the end of this meeting, Ir. Bambang, MM. expresses again his appreciation for what CSP and its members had been performed for the development of sustainable cocoa sector. Accordingly to him, every support, even it is in small scale, to the improvement and development of cocoa productivity in Indonesia, is significant. In relation to the improvement of quality and competitiveness of national cocoa, the Directorate General of Estate Crops proposes the implementation of current two regulations. Firstly, the mandatory of national standard on quality standardization. "The Minister of Agriculture Decree Number 67 is relatively a burden, then the farmers are not able in implementing fermentation. They must report to several places only for doing fermentation. If possible, we should not create difficulties in engaging them into something good. And it has being finalized, then we will put it as mandatory." Ir. Bambang, MM. says. Secondly, after the Indonesian cocoa production fit the national standards, then the results of each commodities can be gathered and it should be returned to those commodities. For each cocoa product exports, there is regulation in term of export duty. And the result of gathered export duties will be allocated to the cocoa sector, not for other commodity sector. This regulation can be implemented based on the Director General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia.

"If it is possible to implement this regulation in cocoa sector, then the crop sector will be independent and will not burden the national budget. And it needs to be discussed further, not a necessity to put focus on other small issues which are technical matters. If CSP and its members can facilitate the policy that provide benefits for all parties, it will be a great movement." Ir. Bambang, MM. elaborates.

And as closing, the Directorate General of Estate Crops expresses his hopes on activities which are implemented by CSP members. "It will be less advantageous if CSP and its members who are working with each resource, provide less direct beneficiaries to the farmers. By having discussion, as we do right now, we can allocate and direct the activities harmonically in the future. And the activities are oriented to the prompted necessities." As closed by Ir. Bambang, MM. (CSP/AH)



Meeting with the Director of Seed Propagation, Directorate General of Estate Crops, Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture:

PROVIDING ACCESS FOR COCOA FARMERS TO CERTIFIED AND QUALIFIED PLANTING MATERIALS

THE availability of qualified and certified planting materials is the key factor for the successful development of sustainable cocoa sector in Indonesia through the improvement of cocoa production and productivity. And the most significant issues regarding the planting material are the availability and affordable of qualified planting materials for farmers. It has been proven that the demands of farmers on these planting materials have not been fulfilled.

In other hand, the information on sources of seeds, both of seed source gardens and nurseries, and the availability of certified planting materials sources in Indonesia are not well distributed to the cocoa stakeholders. Accordingly to the data of Directorate of Seed Propagation, Ministry of Agriculture, the number of certified seed source gardens in Indonesia for 2017 is 24 sources. And this number consists of 21 seed source gardens and 3 entrees garden, and distributed in 17 districts/municipals in Sumatera and Java islands. From the data, it is clearly shown that there is gap of number of

certified planting materials, particularly in the cocoa production centers in Indonesia.

Regarding this issue is significant, in the beginning of August 2017, Cocoa Sustainability Partnership in joint cooperation with Indonesia Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI), and Indonesian Cocoa Board conducted a workshop on certified planting materials propagation in order to support the farmers in gaining access toward cocoa planting materials by improving the synergy among stakeholders in this sector. The objectives of the workshop itself were ensuring how the farmers can possess access in fulfilling their needs on qualified planting materials based on the local compatibility, how to establish the collaboration in supporting the seed source gardens, budwood gardens, and nurseries to be able in meeting the requirements of certified planting material standards based on government regulation, and how to identify the role and function of each stakeholder in cocoa sector in order to provide sufficient accesses for the farmers

towards qualified planting materials.

In relation to the socialization and harmonic implementation of workshop outputs, Cocoa Sustainability Partnership did courtesy call to the Directorate of Seed Propagation, Directorate General of State Crops, Ministry of Agriculture, few weeks ago. The CSP was represented by Wahyu Wibowo as Executive Director of CSP, Imam Suharto as representative of CSP Supervisory Board, and A. Muhammad Amin from CSP executive office, and welcomed and received by Ir. H. Muhammad Anas, the Director of Seed Propagation.

During the meeting, the main program of the Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture was described in details, i.e. the establishment of Seed Independent Village (*Desa Mandiri Benih*). “*This national government program must be initiated with the strengthening of farmers' human resources and farmers' institution. If these two elements are established, the farmers institutions will possess ability and commitment in developing seed source gardens as business unit, and it is also enabling them in fulfilling the requirements of regulation in term of seed gardens management.*” As Ir. H. Muhammad Anas explains about this government program.

The Director of Seed Propagation also proposed to CSP in identifying the farmers, or farmers groups, who had established seed garden as their business units in areas where CSP members were working in Indonesia. If the data of seed gardens which managed by farmers or farmers groups had been existed, then the duty of Directorate of Seed Propagation was to encourage them by strengthening their farmers institutions to be able in fulfilling the requirements that had been issued by the Ministry of Agriculture, in particular the seed certification as qualified planting materials.

The collaboration could be initiated among Directorate of Seed Propagation and Cocoa Sustainability Partnership as partnership forum for the sustainable cocoa stakeholders in Indonesia. The government would act as the knowl-



Foto: Armin Hari

edge provider for the model and farmers institutions strengthening in term of regulations and guidelines that had been enacted by the government. CSP itself could play function as facilitators and mediators of technical meetings among government, seed producers, and farmers groups in the cocoa production centers in Indonesia.

The technical meeting itself would discuss the socialization processes of the Directorate of Seed Propagation on regulation, process, and stages as mandatories in establishing seed gardens. Furthermore, the Indonesia Coffee and Cocoa Research Institute (ICCR), or any other CSP members, explained about the seeding technologies which were applicable in farmers groups level. In general, the expectation was this technical meeting must produce a common agreement regarding the action plans, outputs, and beneficiary description that can be gained by farmers and farmers groups.

“The farmers groups will be the pioneers of this collaborative program among the Directorate of Seed Propagation and Cocoa Sustainability Partnership in the future. If they are able in establishing seed garden based on the standards, then the Directorate General of Estate Crops will assist the processes of certification for these seed gardens.” Ir. H. Muhammad Anas expressed. It was also discuss that the Directorate of Seed Propagation also informed the possibilities in developing

the certified seed gardens in scope of government program in social forestry system which covered four commodities, i.e. cacao, coffee, rubber, and nutmeg. This program also would accelerate the integration of seed gardens as business units.

In addition, the Directorate of Seed Propagation also would update the distribution data of certified cocoa planting materials sources in Indonesia. And as information on planting material accesses, the distribution data could be distributed further by CSP and its members. *“The results of this meeting will be distributed by CSP to its members and other cocoa stakeholders in Indonesia, and while constructing coordination with the Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture. It is expected that the results of this meeting can be afforded in term of collaboration initiatives plan among the Directorate of Seed Propagation and CSP. And our objectives are how to develop and empower the certified cocoa seed producers, and how to integrate the seed gardens as business units for the farmers groups in the future.”* As stated Wahyu Wibowo, the Executive Director of Cocoa Sustainability Partnership. (CSP/AH)

